



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014

BUKU I
PRIORITAS NASIONAL

Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010



DAFTAR ISI

BUKU I RPJMN TAHUN 2010-2014

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
BAB II KONDISI UMUM	I-3
2.1 Latar Belakang	I-3
2.2 Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009.....	I-4
2.3 Tantangan Pembangunan Nasional	I-18
BAB III ARAHAN RPJPN 2005-2025	I-22
3.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025	I-22
3.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2010-2014)	I-25
BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014	I-28
4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional	I-28
4.1.1 Visi Indonesia	I-28
4.1.2 Misi Pembangunan	I-37
4.1.3 Agenda Pembangunan	I-33
4.1.4 Sasaran Pembangunan	I-43
4.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	I-49
4.2.1 Arah Kebijakan Umum	I-49
4.2.2 Prioritas Nasional	I-50
4.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan	I-61
4.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	I-62
4.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar	I-64
4.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Laut	I-71
4.4.3 Pengembangan Kawasan	I-75
BAB V KERANGKA EKONOMI MAKRO 2010-2014.....	I-77
5.1 Keadaan Ekonomi 2009	I-77
5.2 Prospek Ekonomi 2010-2014	I-80
5.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	I-80
5.2.2 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh	I-82
5.2.3 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan	I-84



5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya	I-87
5.2.5 Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah	I-93
BAB VI PENUTUP	I-100
LAMPIRAN	I-101
Matriks Penjabaran Prioritas Nasional	I-101



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014	I-46
Tabel 2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2010-2014 (Dalam Persen)	I-81
Tabel 3 Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014	I-92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III	I-2
Gambar 2 Capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia	I-7
Gambar 3 Grafik Perbandingan Perkara Masuk dengan Sisa Perkara	I-8
Gambar 4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Per Kapita	I-10
Gambar 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan	I-12
Gambar 6 Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Terbuka	I-13
Gambar 7 Perkembangan Produksi Pangan	I-15
Gambar 8 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka PartisipasiKasar (APK)	I-16
Gambar 9 Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	I-17
Gambar 10 Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025	I-25



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan **penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden** yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

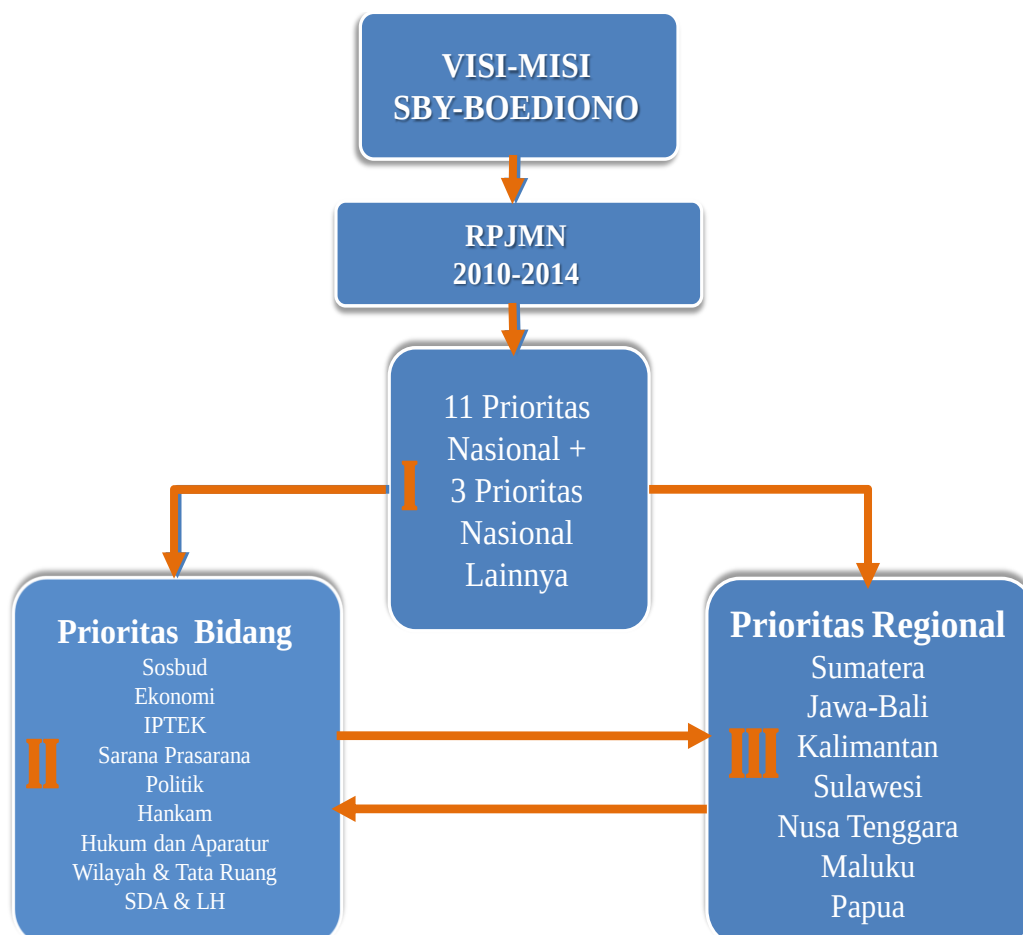
Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

- Buku I** memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.”**
- Buku II** memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: **“MEMPERKUAT SINERGI ANTARPIDANG PEMBANGUNAN”** dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: **“MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH”** dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

GAMBAR 1
KETERKAITAN BUKU I, BUKU II, DAN BUKU III





BAB II

KONDISI UMUM

2.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita bangsa Indonesia bersama. Cita-cita untuk menjadikan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan adil. Cita-cita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Segenap bangsa Indonesia menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melewati sejumlah cobaan, tantangan, dan hambatan. Bangsa Indonesia tetap tegak berdiri, melangkah dengan pasti, dan berhasil melewati proses sejarah yang panjang dengan selamat.

Lebih dari satu dasawarsa bangsa Indonesia telah memutuskan untuk menempuh jalur perjalanan baru dalam sejarahnya, jalur demokrasi. Setelah didera oleh krisis multidimensi yang telah mengguncang fondasi bernegara, bangsa Indonesia telah mampu bangkit kembali. Indonesia telah mampu membangun dirinya, bahkan dengan lebih baik lagi, sehingga wibawa dan kehormatannya sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, diakui dan dihormati kembali oleh dunia.

Sepuluh tahun yang lalu, ekonomi mengalami guncangan, pertumbuhan mengalami kontraksi di atas 13%, nilai tukar rupiah runtuh, inflasi mencapai 70%, utang pemerintah melambung di atas 100% dari PDB, kemiskinan dan pengangguran melonjak tinggi. Seluruh kegiatan ekonomi praktis merosot dan terhenti. Kerusakan sosial dan konflik berdarah merebak. Tatahan politik berubah secara fundamental dengan pelaksanaan demokrasi, desentralisasi, dan amendemen konstitusi. Tatahan hidup masyarakat berubah secara drastis. Sebagian lembaga publik, menjadi tidak berfungsi. Bangsa Indonesia, mengalami sebuah euforia reformasi dan kebebasan. Proses transisi yang tiba-tiba itu, begitu sulit dikelola karena heterogenitas dan kompleksitas persoalan yang harus kita hadapi.

Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dan tantangan global yang makin sulit, seperti gejolak harga minyak, meroketnya



harga pangan dan terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan resesi ekonomi dunia, Indonesia secara bertahap tetapi pasti, menata dan membangun kembali Indonesia di segala bidang. Perekonomian pulih, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai oleh pemerataan (*growth with equity*) dan bahkan memulihkan lingkungan alam yang rusak. Tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur dan bermartabat terbangun. Demikian pula, kehidupan politik yang aman, damai, adil, beretika, dan demokratis. Kehidupan budaya dan jati diri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hukum semakin ditegakkan tanpa pandang bulu. Kondisi yang aman dan damai telah dipulihkan dan dipelihara di daerah-daerah konflik, utamanya di Aceh, Maluku, dan Papua.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Di masa datang, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, tetapi tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan, dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus terus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

2.2 Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009

Selama periode 2004-2009, dengan kerja keras semuanya di tengah berbagai tantangan dalam negeri dan internasional yang dihadapi, bangsa Indonesia telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil, dan lebih demokratis serta lebih sejahtera. Indonesia tidak hanya sekedar pulih dari krisis, tetapi Indonesia telah mampu membangun ketahanan nasional, prestasi, serta reputasi yang baik di mata dunia.



Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, telah makin mengatasi ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization of Economic and Cooperation Development*) mengakui dan mengapresiasi kemajuan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan diundang untuk masuk dalam kelompok '*enhanced engagement countries*' atau negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia juga tergabung dalam kelompok Group-20 atau G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir telah banyak kemajuan yang telah dicapai di dalam mewujudkan tiga agenda pembangunan RPJMN 2004-2009.

Upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, telah membuahkan hasil. Di seluruh Indonesia, tidak ada gangguan keamanan yang berarti. Perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam dan di beberapa daerah konflik lainnya seperti Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua telah menunjukkan kondisi keamanan yang semakin kondusif. Peningkatan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, merupakan salah satu cermin dari perbaikan keamanan di tanah air. Begitu pula peningkatan investasi, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan cerminan dari tercapainya kondisi keamanan yang semakin membaik.

Kemajuan yang berarti juga terlihat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik yang telah mengubah tatanan politik negara kita dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang relatif demokratis. Lembaga-lembaga penyelenggara negara yang telah ada terlihat bergerak maju secara lebih dinamis dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi. Lembaga-lembaga negara independen yang didirikan pada era reformasi berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amendemen dan perundang-undangan yang baru telah menunjukkan kinerja yang relatif sangat baik.

Pemilihan umum legislatif telah berjalan secara jujur, adil, aman, dan lancar sebanyak tiga kali setelah reformasi politik digulirkan tahun 1997/1998. Konsolidasi demokrasi mencapai puncak, dengan diberlakukannya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004, yang diikuti dengan dimulainya pemilihan langsung kepala daerah pada 2005. Jika pada tahun 2003 seluruh kepala daerah masih dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maka pada tahun 2007 sudah dua pertiganya yang dipilih melalui pemilu langsung. Kini, seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah air telah dipilih langsung oleh rakyat. Yang juga membanggakan adalah Penyelenggaraan pemilu dan seluruh pemilihan kepala daerah berjalan dengan demokratis, jujur, adil, aman dan



damai.

Akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah sudah semakin baik. Para kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja yang prima dalam masa pemerintahannya, pada umumnya terpilih kembali. Beberapa kepala daerah kabupaten/kota dengan kinerja yang optimal, bahkan terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur. Pemerintah juga terus melanjutkan proses pembangunan kelembagaan demokrasi. Mekanisme *checks and balances* telah diperluas ke seluruh lembaga penyelenggara negara di pusat dan daerah. Berbagai institusi independen telah dibentuk untuk memperkuat mekanisme *check and balances*.

Dalam 5 tahun terakhir ini pun, kebebasan sipil menunjukkan kinerja yang positif, yang dapat dilihat dari semakin baiknya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berusaha, dan kebebasan berkumpul dan berserikat.

Dengan berbagai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang bergerak maju secara lebih mantap dalam proses konsolidasi demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945.

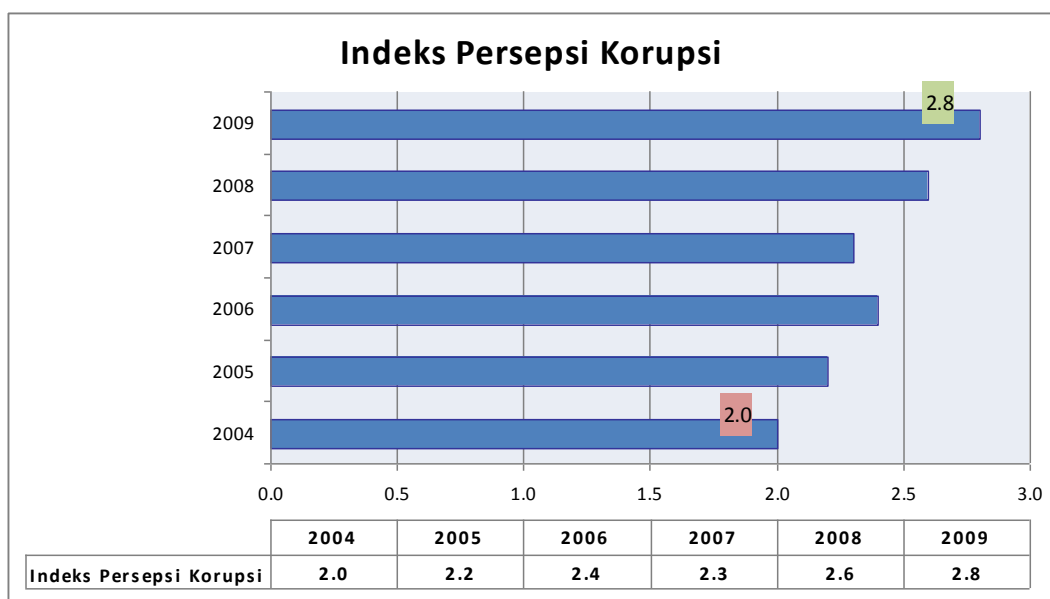
Salah satu bagian penting dalam proses transformasi dalam agenda mewujudkan keadilan adalah terbangunnya tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa (*good governance and clean government*). Indonesia berhasil bangkit dari sebuah negara, yang tata kelola pemerintahannya dianggap buruk, karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas, menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Dalam bidang penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Termasuk juga aparat penegak hukum. Sikap tegas kejaksan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan keuangan negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi didukung oleh penyusunan perundangan-undangan yang baik dan kuat, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan tanpa kompromi. Dengan langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan martabatnya di mata dunia.

Laporan UNDP bertajuk *Tackling Corruption, Transforming Lives*, 2008, menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi, *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia telah menunjukkan banyak perbaikan. Dalam skala 1 sampai dengan 10, dengan keterangan bahwa skala 1 menunjukkan persepsi terhadap suatu negara sebagai yang paling korup, dan 10 menunjukkan persepsi terhadap negara sebagai yang paling bersih, indeks persepsi korupsi Indonesia telah mengalami perbaikan dari 2,0 pada tahun 2004, menjadi 2,6 pada tahun 2008 dan 2,8 pada tahun 2009.

Di sisi lain, upaya untuk melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, dan bertahap terus dimantapkan pelaksanaannya. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena jajaran birokrasi adalah pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. Langkah yang telah dan terus dilakukan mencakupi perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta perbaikan sistem remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Semua ini merupakan esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

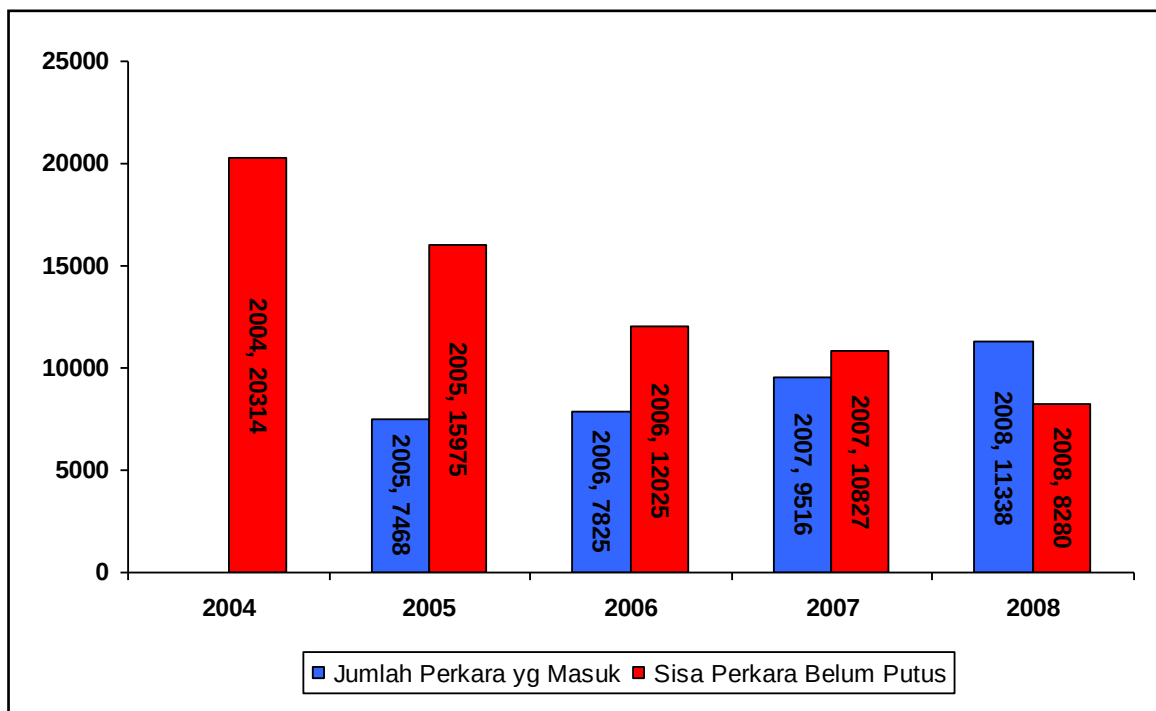
GAMBAR 2
CAPAIAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA



Sumber: UNDP

Selanjutnya, keberhasilan pembangunan hukum tidak terlepas dari peran lembaga peradilan. Penanganan perkara di 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan kinerja yang meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan antara tahun 2005 dengan tahun 2008, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat sebesar 51% (lihat Gambar 3). Dari sisi perkara yang belum diputus, efektivitas kinerja MA juga menunjukkan peningkatan dengan menurunnya jumlah sisa perkara (*backlog cases*), dimana kondisi sisa perkara pada tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara, menurun menjadi 8.280 perkara di tahun 2008.

GAMBAR 3
GRAFIK PERBANDINGAN
PERKARA MASUK DENGAN SISA PERKARA



Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada periode 2004--2009 sangat besar. Pada bulan Desember 2004, bencana alam tsunami melanda Aceh, yang diikuti dengan bencana yang terjadi di kepulauan Nias. Di samping itu, guncangan ekonomi global yang berlanjut dengan krisis energi dan pangan pada akhir tahun 2006-2007, telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan ini berlanjut dengan terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat sejak tahun 2008 yang telah memicu terjadinya krisis ekonomi global yang dicerminkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Dalam memasuki tahun 2009, tekanan tersebut terus diwaspadai karena situasi perekonomian dunia tetap mengandung ketidakpastian yang tinggi. Saat itu, prediksi banyak pihak menyatakan bahwa dampak krisis ekonomi global akan terus berlangsung hingga tahun-tahun mendatang ke seluruh dunia. Indonesia tergolong sebagai sedikit negara di dunia yang diyakini oleh beberapa lembaga internasional akan mampu mengarungi krisis global ini dengan relatif baik. Hal ini terbukti dari perekonomian Indonesia yang masih meningkat secara positif, baik dari ketika dimulainya krisis pada tahun 2008 maupun selama tahun 2009.

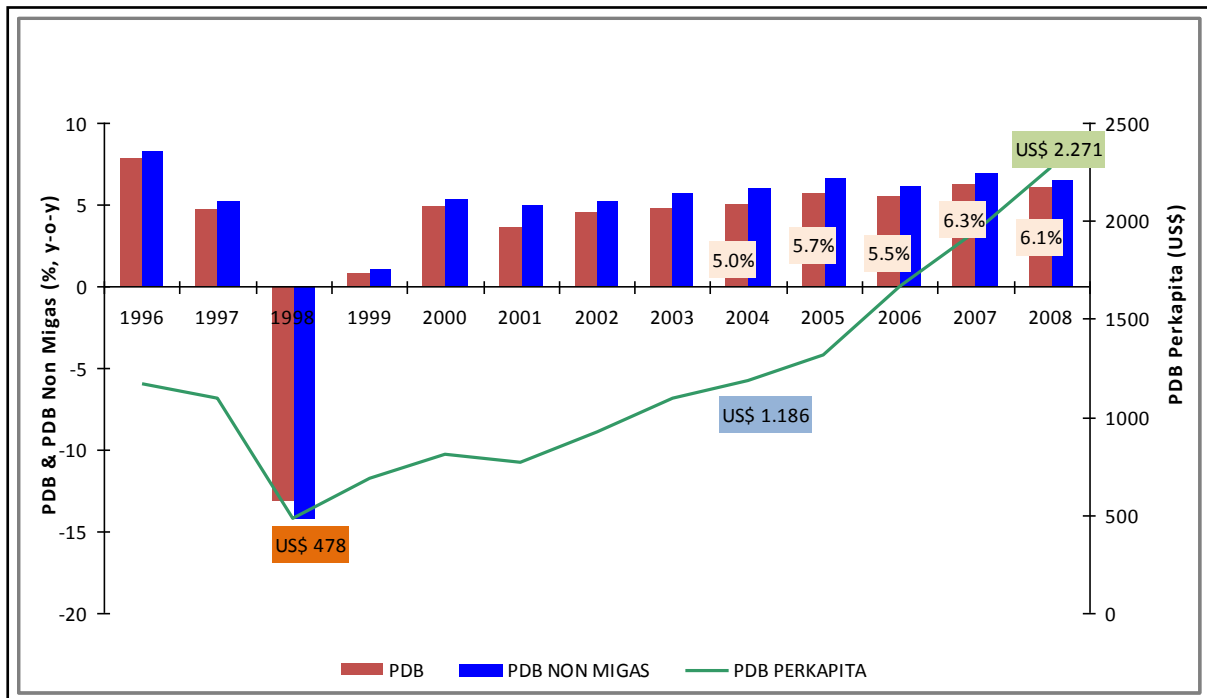
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, telah



ditetapkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro jobs* dan *pro poor*. Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai goncangan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *pro growth*, *pro jobs*, dan *pro poor*, telah memberikan arah pembangunan yang benar dan hasil yang diinginkan.

Secara lebih terperinci, dalam agenda *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 1997-1999, krisis ekonomi telah menyebabkan volume perekonomian menyusut rata-rata minus 2,9 persen per tahun. Sementara itu, dalam periode 2000-2004, pada masa pemulihan ekonomi, perekonomian kembali tumbuh positif, yaitu 4,5 persen. Sementara itu, dalam periode 2005-2008, perekonomian tumbuh rata-rata 6 persen. Bahkan, jika sektor migas dikeluarkan laju pertumbuhan sektor nonmigas sudah mendekati 7 persen per tahun yaitu 6,6 persen (2005-2008) jika dibandingkan dengan 5,4 persen dalam periode 2000-2004. Pada tahun 2009, sampai dengan triwulan III pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sekitar 4,2 persen sehingga secara keseluruhan tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,3 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang memiliki kinerja perekonomian yang baik mengingat banyaknya negara yang pertumbuhan ekonominya negatif.

GAMBAR 4
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PERKAPITA



Percepatan pertumbuhan ekonomi ini tercermin pula dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah mencapai USD 2.271 pada akhir 2008, naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2004, yaitu sebesar USD 1.186. Dengan kenaikan ini, Indonesia telah masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income countries*)

Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut telah menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, telah menurun menjadi 14,1 persen (atau 32,5 juta orang) pada Maret 2009, jika dibandingkan dengan 16,7 persen (36,1 juta orang) pada tahun 2004. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan selain merupakan hasil dari tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi juga didukung oleh berbagai program intervensi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat, yang terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini ditempuh dengan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

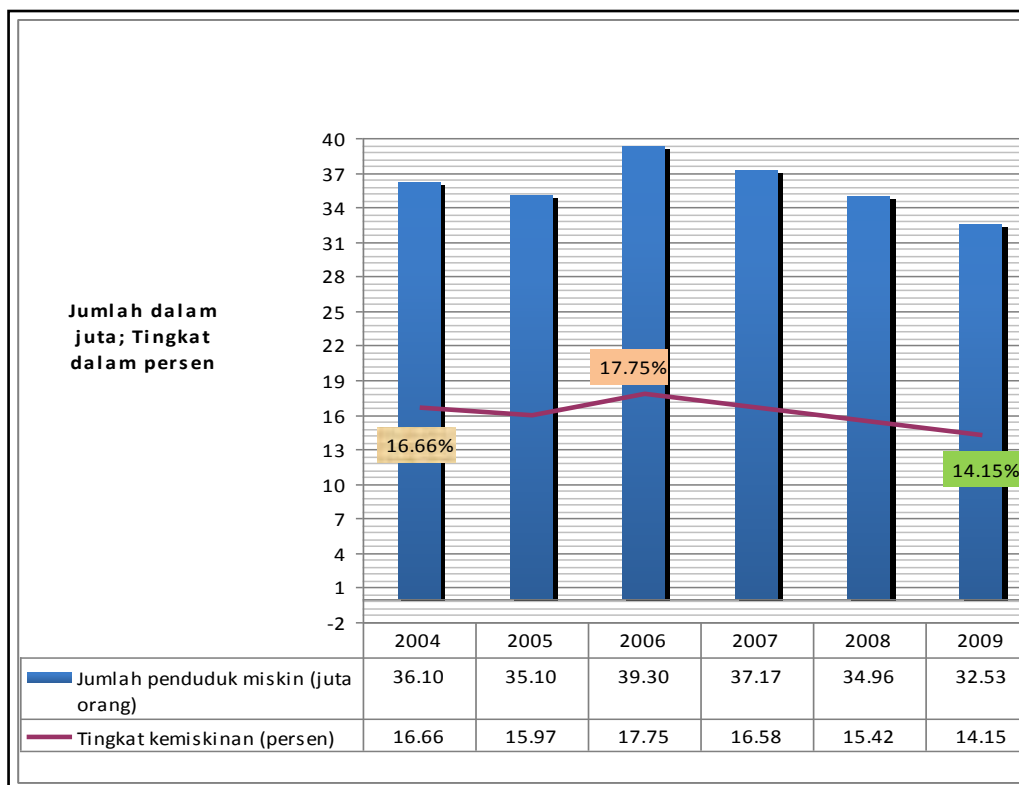
Pertama adalah melalui subsidi (seperti subsidi pangan, pupuk, benih, dan kredit program) serta dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), seperti Program Jaminan



Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh kemampuan sendiri. Di samping itu, telah dialokasikan juga anggaran berupa Bantuan Langsung Masyarakat sebagai bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

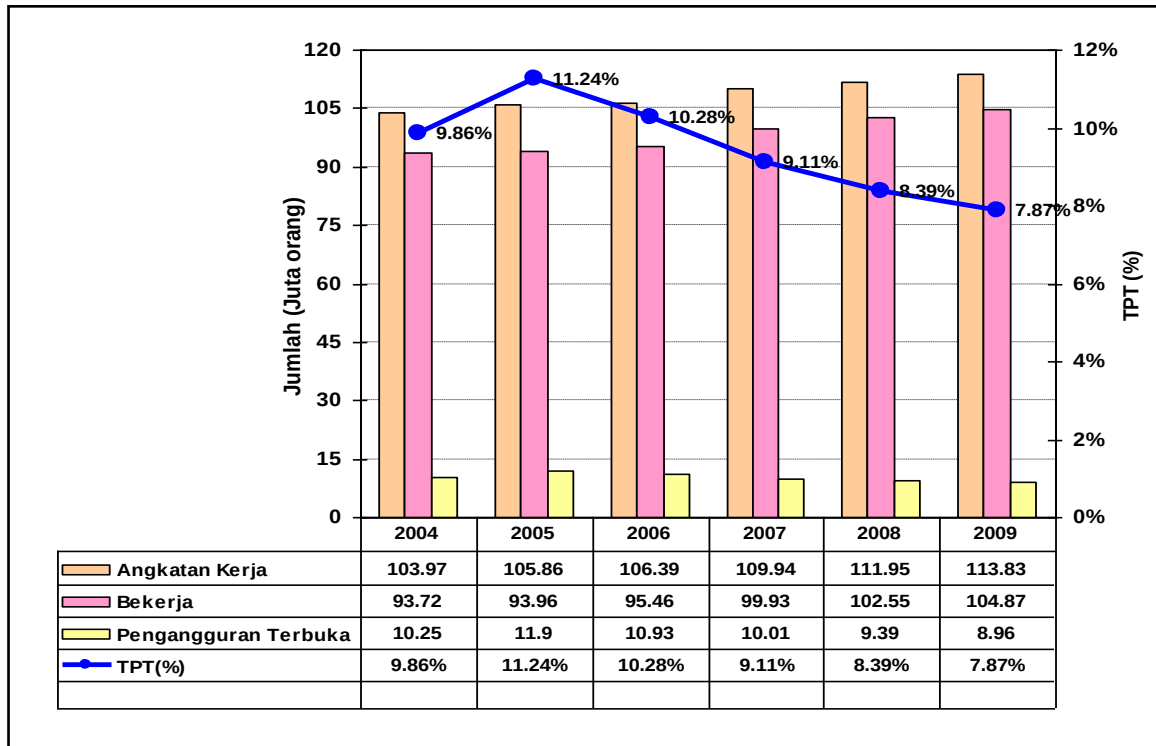
Kedua adalah mempermudah dan memperluas kesempatan usaha dengan menghilangkan berbagai pungutan yang muncul di berbagai daerah akibat eforia reformasi dan desentralisasi yang telah banyak membebani usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai upaya telah ditempuh untuk memperbaiki iklim berusaha ini. Salah satunya adalah dengan melakukan amendemen UU Pajak dan Retribusi Daerah untuk mendisiplinkan pemerintah daerah dalam menetapkan pungutan baru dengan tidak menghilangkan semangat desentralisasi fiskal. Langkah lainnya, ditempuh dengan menerbitkan Inpres No 6 /2007 dan Inpres 5 /2008 yang memuat program aksi yang kongkrit dalam memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM.

GAMBAR 5
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN



Perubahan yang berarti terlihat sebagai akibat dari strategi *pro jobs*. Pada periode tahun 2001-2004, penambahan angkatan kerja baru sebesar 1,72 juta per tahun, sementara kesempatan kerja yang mampu tercipta hanya 970 ribu per tahun. Pada periode 2005-2009, angkatan kerja bertambah 1,99 juta per tahun sementara kesempatan kerja yang tercipta sebesar 2,73 juta per tahun. Dengan demikian, jumlah penganggur dapat diturunkan dari 10,25 juta tahun 2004 menjadi 8,96 juta tahun 2009, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86% menjadi 7,87%. Kesempatan kerja tetap tercipta, meskipun terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimulai sejak akhir tahun 2008, ketika jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan PHK cukup banyak bersamaan dengan berakhirnya kontrak produksi khususnya untuk barang tujuan ekspor. Pekerja formal bertambah 3,26 juta dan informal 7,65 juta. Perpindahan 'surplus tenaga kerja' keluar dari lapangan pekerjaan informal ke pekerjaan-pekerjaan formal yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi merupakan tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

GAMBAR 6
JUMLAH ANGKATAN KERJA, BEKERJA, DAN PENGANGGURAN TERBUKA



Di bidang sarana dan prasarana, beberapa infrastruktur yang cukup strategis telah berhasil diselesaikan pembangunannya, antara lain penyelesaian pembangunan Bandara Hasanuddin Makassar, pembangunan Jembatan Suramadu dan pengembangan terhadap 11 pelabuhan peti kemas (*full container terminal*) untuk menunjang ekspor-impor, meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang. Di samping itu, telah dibangun 11 buah waduk yang mampu menampung sekitar 79 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, industri serta keperluan pembangkit listrik. Program percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW, secara signifikan telah meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik masing-masing sekitar 66,3 persen dan 96,8 persen dengan tingkat *losses* sekitar 11,5 persen. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menyehatkan bauran energi di pembangkit tenaga listrik. Sementara itu, pengembangan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi telah mampu meningkatkan pertumbuhan teledensitas *fixed line* (termasuk *fixed wireless access* atau FWA) hampir 140 persen, yaitu dari 4,79 persen menjadi 11,49 persen, pertumbuhan seluler sebesar 340 persen, dan pertumbuhan pengguna internet sebesar 101 persen.

Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta, masyarakat, dan pemerintah



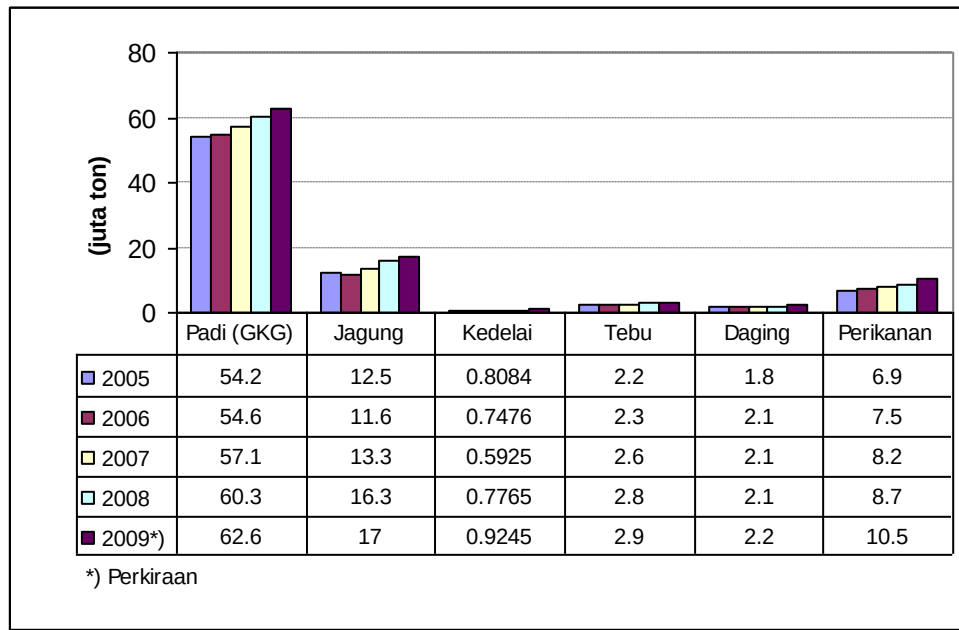
daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana. Skema pembangunan sarana dan prasarana melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 terus-menerus dilakukan penyempurnaannya. Revisi terhadap Perpres tersebut disertai pula dengan pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009 dalam Inpres No 5 tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi Tahun 2008-2009 sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat investasi di sektor sarana dan prasarana, termasuk persoalan yang terkait dengan partisipasi sektor swasta. Elemen penting dari paket kebijakan tersebut adalah kerangka kerja bagi KPS, termasuk di dalamnya mekanisme penyiapan proyek, proses tender yang transparan dan akuntabel, alokasi risiko antara investor dan Pemerintah.

Kemajuan yang berarti juga terjadi dalam produksi pangan. Produksi semua komoditas pangan meningkat tajam, khususnya dalam dua tahun terakhir (lihat Gambar 7). Produksi beras tahun 2008 sebesar 59,9 juta ton adalah tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah produksi yang bisa dihasilkan selama ini. Peningkatan produksi ini bukan hanya melepaskan bangsa Indonesia dari krisis pangan, tetapi juga meringankan beban bangsa lain dalam mengatasi krisis pasokan beras di pasar global. Indonesia sebelumnya merupakan salah satu importir beras dunia yang cukup besar, akibatnya setiap Indonesia mengimpor beras dalam jumlah besar, harga beras dunia akan meningkat USD 20-50/ton.

Keberhasilan meningkatkan produksi beras sekaligus mengendalikan harganya, telah menjadikan Indonesia mampu mengatasi krisis pangan. Keberhasilan ini diakui dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan yang diadakan di Roma, bulan Juni 2008, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memuji keberhasilan tersebut. FAO bahkan menyatakan bahwa keberhasilan itu layak dijadikan model bagi negara lain dalam mengatasi krisis pangan global. Keberhasilan dalam meningkatkan produksi beras ini harus terus dilanjutkan.

Kecenderungan peningkatan produksi pangan juga terjadi pada komoditas lain seperti gula, kedelai dan jagung. Keberhasilan peningkatan pangan melalui peningkatan produksi akan menguntungkan produsen dan konsumen. Produsen akan mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara konsumen memperoleh keuntungan dalam bentuk tercapainya stabilitas harga. Karena lebih dari separuh keluarga miskin menggantungkan sumber penghasilannya dari kegiatan pertanian dan pedesaan, manfaat perbaikan produksi di bidang pangan ini akan lebih banyak dinikmati oleh keluarga miskin. Kondisi ini pada gilirannya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan seperti yang pernah terjadi pada periode 1970an dan 1980an.

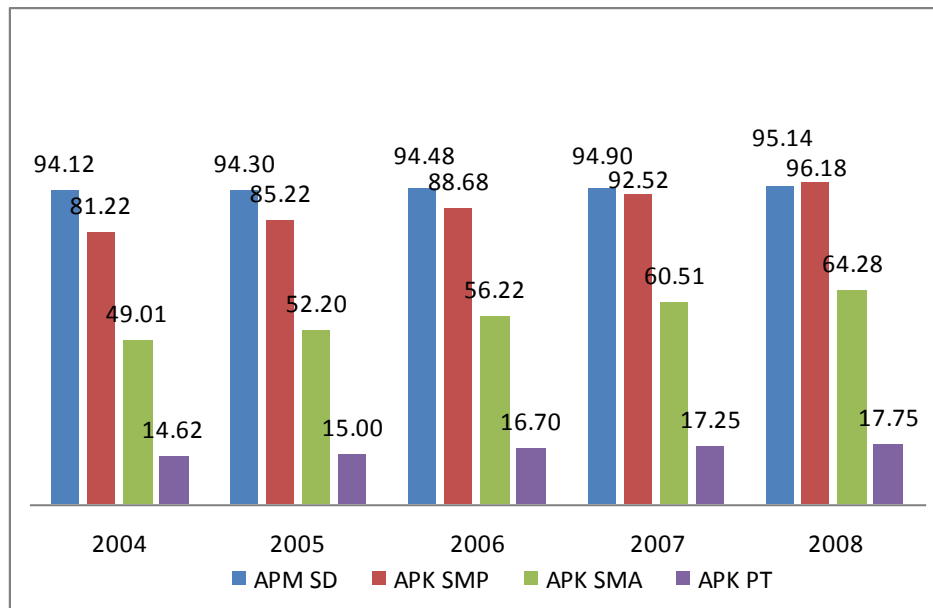
GAMBAR 7
PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN



Dalam bidang pendidikan, peningkatan anggaran secara dramatis telah dilakukan. Jika pada tahun 2005 anggaran pendidikan hanya Rp 78,5 triliun, maka sesuai dengan amanat konstitusi anggaran pendidikan telah berhasil ditingkatkan dua kali lipat, menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Pada tahun 2009, amanat konstitusi telah berhasil dipenuhi dengan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi Rp 207,4 triliun atau 20 % dari APBN. Peningkatan anggaran pendidikan dapat memperbaiki akses bidang pendidikan dan kualitas pendidikan.

Kemajuan juga terlihat dari peningkatan angka tingkat partisipasi kasar tingkat SMP/MTS/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C yang meningkat dari 85,22 persen dan 52,20 persen (2005) menjadi 96,18 persen dan 64,28 persen (2008). Peningkatan angka tingkat partisipasi kasar ini adalah berkat dari berjalannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005. Program ini memungkinkan biaya sekolah yang harus dibayar oleh keluarga Indonesia secara efektif dapat ditekan hingga tingkat yang minimum dan dengan dukungan dari APBD, makin banyak daerah yang mampu membebaskan biaya pendidikannya. Dari sisi permintaan, pemerintah telah merintis skema insentif baru untuk mendorong keluarga miskin mengirimkan anaknya ke sekolah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Kombinasi program BOS yang bersifat universal dari sisi penawaran dan program PKH yang terbatas, diharapkan bukan hanya mampu memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa dalam persaingan global yang makin ketat.

GAMBAR 8
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DAN
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)



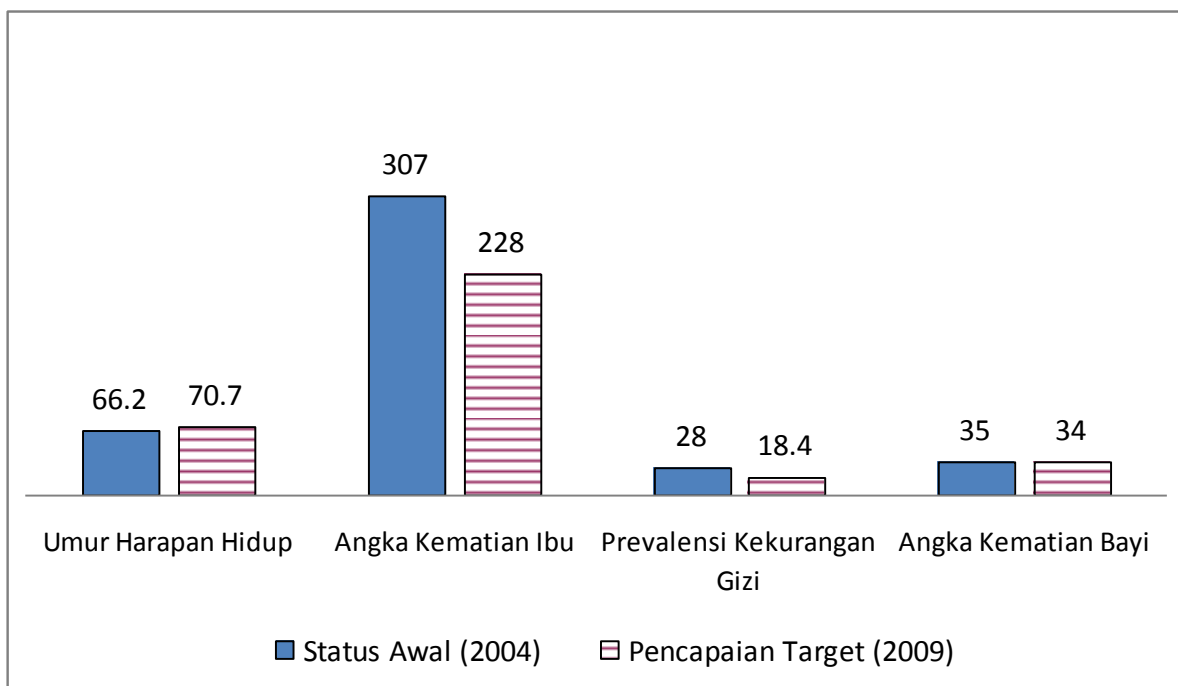
Keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada pasokan dan kualitas guru dan dosen. Ekspansi anggaran bidang pendidikan di samping digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam merehabilitasi gedung sekolah – yang dibangun tahun 1970-an dan 1980-an – serta penambahan ruang kelas dan unit sekolah baru, digunakan pula untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan juga dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah dan universitas berkualitas internasional. Dimulai pada tingkat SMA pada sekolah negeri, pemerintah telah secara bertahap meningkatkan kualitasnya menjadi bertaraf internasional dengan melakukan komputerisasi dan meningkatkan penguasaan bahasa asing yang disertai dengan akses internasional.

Selain dalam bidang pendidikan, pelayanan di bidang kesehatan juga terus ditingkatkan. Jika pada tahun 2005 anggaran kesehatan hanya mencapai Rp 7,7 triliun maka pada tahun 2008 anggaran kesehatan menjadi sekitar Rp 17,9 triliun. Sebagian besar tambahan anggaran kesehatan itu digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu yang dibiayai antara lain melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu (Jamkesmas). Program ini pada tahun 2008 berhasil melayani 76,4 juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, harga obat generik telah diturunkan secara substansial dan terus menerus. Sebagian dari anggaran kesehatan

yang terus meningkat, digunakan untuk merekrut tenaga dokter dan paramedis baru serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitasi puskesmas dan membangun rumah sakit baru di berbagai daerah. Sebagian dana kesehatan juga telah digunakan untuk program Revitalisasi Keluarga Berencana yang sempat terlantar pada awal reformasi dan desentralisasi. Ekspansi sektor kesehatan sebagian telah memberikan hasil yang nyata, seperti penurunan tingkat prevalensi anak gizi buruk.

GAMBAR 9
STATUS KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT



Dalam kaitannya dengan upaya menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi global, hingga saat ini Indonesia relatif lebih siap jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Sektor keuangan jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Kredit bermasalah pada akhir September 2009 hanya sebesar 3,8 persen, jauh di bawah 35 persen pada saat menjelang krisis 1997/1998. Fungsi supervisi perbankan dan sektor keuangan berjalan semakin baik. Resiko ekonomi makro juga cenderung menurun, antara lain dapat dilihat dari rasio utang pemerintah termasuk utang luar negeri. Keberhasilan menghadapi krisis ekonomi global ini menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih dihargai. Jika di masa lalu, Indonesia selalu mendapat rekomendasi dalam kebijakan mengatasi krisis, kini beberapa negara di dunia meminta rekomendasi dan belajar dari Indonesia tentang cara mengatasi krisis.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai diperoleh melalui kebersamaan dan kerja

keras di antara pemerintah, dunia usaha, dan segenap rakyat Indonesia. Salah satu hasilnya adalah dalam peningkatan pengelolaan dan kesadaran pembayaran pajak. Sumber pendanaan pembangunan Pemerintah kini lebih banyak mengandalkan penerimaan pajak dan pembiayaan dari pasar domestik. Konsolidasi fiskal yang dilakukan di masa lalu telah membuahkan hasil yang memadai, bukan hanya untuk memperkuat fiskal secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan ketersediaan dana pembangunan yang memadai untuk mendorong perekonomian domestik.

Inti dari konsolidasi fiskal terletak pada perbaikan struktur penerimaan negara, peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah, serta terkendalinya risiko fiskal terutama menyangkut sisi pembiayaan defisit anggaran. Struktur penerimaan makin sehat dengan meningkatnya peran penerimaan nonmigas, khususnya pajak penghasilan. Jumlah penduduk yang memiliki NPWP telah melebihi 10 juta pada tahun 2008. Peningkatan jumlah wajib pajak di samping meningkatkan penerimaan pajak juga mengurangi risiko dalam penerimaan. Rasio pajak terhadap PDB meningkat dari 12,5 persen pada tahun 2005 menjadi 14,1 persen pada tahun 2008. Peningkatan penerimaan ini merupakan hasil dari reformasi perpajakan secara komprehensif sehingga telah menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara untuk kebutuhan yang penting bagi pembangunan terus meningkat terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efektivitas pengeluaran pemerintah makin mendekati tingkat optimal dan makin mengarah pada kegiatan-kegiatan yang penting. Meskipun masih ada pengeluaran yang tidak dapat direalisasikan, namun hal ini sebagian disebabkan oleh efisiensi sebagai hasil sistem pengadaan yang makin baik, antara lain melalui *e-procurement* dapat menghemat pengeluaran hingga 15 persen.

Konsolidasi fiskal telah menghasilkan perbaikan risiko ekonomi makro Indonesia. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai 56,4 persen pada tahun 2004 secara bertahap menurun menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2009. Penurunan rasio ini diikuti pula dengan penurunan jumlah stok utang luar negeri. Pembiayaan defisit anggaran kini lebih mengandalkan pada sumber domestik. Penurunan rasio utang ini, juga lebih baik dibandingkan dengan kecenderungan penurunan rasio utang di negara Asia lainnya. Dengan demikian, proses konsolidasi fiskal ini bisa menjadi motor untuk mempercepat perbaikan peringkat *investment grade* Indonesia dalam 2 tahun mendatang.

2.3 Tantangan Pembangunan Nasional

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014), tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan

global yang meningkat.

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat.

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak

berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antardaerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antardaerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia



dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki.



BAB III

ARAHAN RPJPN 2005-2025

3.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka **Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025** adalah:

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri: Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Adil: Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur: Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian;



pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan



keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

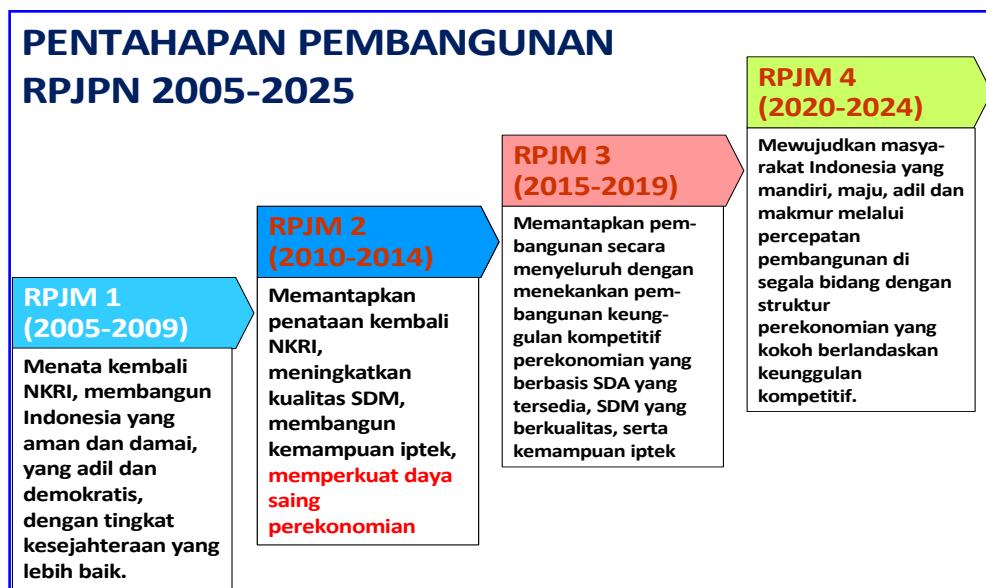
Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. **RPJM ke-1 (2005–2009)** diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. **RPJM ke-2 (2010–2014)** ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. **RPJM ke-3 (2015–2019)** ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4. **RPJM ke-4 (2020–2025)** ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

GAMBAR 10
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025



3.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah Ke-2 (2010—2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia



sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan;



serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.



BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2010--2014

4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional

4.1.1 Visi Indonesia

Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas.

Dengan perkiraan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan secara bertahap, serta tidak lagi terjadi gejolak (*shock*) berskala global yang baru, maka kinerja ekonomi nasional juga akan pulih secara bertahap. Kinerja ekonomi Indonesia telah dan terus diupayakan untuk mengatasi dampak krisis dengan memacu potensi ekonomi dalam negeri. Dalam meniti upaya pemulihan ini, fondasi ekonomi dan stabilitas harus tetap dapat dipelihara dan bahkan harus diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun kedepan akan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5%-6%.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya



untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

Mekanisme pasar dan globalisasi tidak dapat diandalkan untuk secara otomatis menyejahterakan rakyat. Bahkan, mekanisme pasar yang liberal tanpa batas telah membuahkan krisis keuangan global yang berdampak luas dan dapat menyengsarakan masyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih, dan efisien sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan, dan menjaga kepentingan negara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak terbatas. Reformasi birokrasi dan peranan pemerintah yang efektif dan bebas dari konflik kepentingan menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepentingan nasional dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal berharga bagi bangsa yang kuat, kukuh dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan, baik pada lingkup nasional, regional maupun global.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat terus menerus diuji melalui proses ini. Tujuannya, untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya konsolidasi demokrasi harus tetap dilanjutkan. Kebebasan berpendapat harus makin dijamin, dan pilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan yang diimbangi dengan peningkatan



kepatuhan terhadap pranata hukum.

Salah satu elemen penting di dalam demokrasi adalah aspek kesetaraan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat konstitusi mewajibkan negara untuk melindungi segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan jender. Sejarah perjalanan bangsa mengajarkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa diletakkan dalam kerangka monolitik. Demokrasi Indonesia adalah sebuah sejarah keberagaman. Oleh karena itu, demokrasi menjamin keberagaman ini. Keberagaman yang telah dinyatakan dalam semboyan Bhineka Tunggal Eka tersebut harus terus dijaga dan dijadikan modal dasar kultural yang membuat Indonesia menjadi khas dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis. Konsolidasi demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik, melalui proses pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Ke depan, berbagai usaha harus dilakukan untuk membawa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi substansial. Upaya penguatan pilar-pilar demokrasi yang dapat sepenuhnya menjamin proses *checks and balances* harus dilakukan agar hak-hak rakyat dapat dijaga.

Di dalam konstitusi Indonesia, dengan tegas dinyatakan prinsip-prinsip pengawasan antarkekuasaan secara timbal balik dan berimbang. Konstitusi juga secara tegas memuat sejumlah pasal yang berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, supremasi hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab, partisipatif dan terbuka, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia, mutlak harus diwujudkan.

Indonesia saat ini telah menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Upaya ini harus terus diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta memberikan pelayanan publik yang baik, efisien dan murah bagi berbagai pelaku kepentingan, sehingga dihormati oleh dunia internasional.

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”

dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,



kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

4.1.2 Misi Pembangunan

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2004-2009, tentu harus terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di periode 2004-2009 itu, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, pada periode lima tahun yang akan datang, 2010-2014. Pada periode 2010-2014, bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara.

Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008 dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia. Ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009, yang disebabkan rusaknya lembaga-lembaga keuangan dunia yang pada akhirnya akan mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riil dan perdagangan dunia. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG) juga akan mengalami hambatan.

Meskipun pada tingkat pimpinan dunia terdapat inisiatif untuk mengatasi krisis global, antara lain, yang telah dilakukan oleh forum G-20, namun pemulihan ekonomi global sepenuhnya masih akan memerlukan proses yang cukup panjang. Hal ini disebabkan perbaikan kembali sektor keuangan, memperbaiki regulasi dan pengawasan sektor keuangan, melakukan program counter cyclical melalui stimulus fiskal, dan mencegah proteksionisme dengan terus menjaga arus perdagangan antarnegara membutuhkan koordinasi yang rumit antarnegara, selain juga melalui proses politik di masing-masing negara yang tidak mudah.



Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri.

Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim (climate change) tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam.

Indonesia memiliki potensi geografi yang strategis yang ditopang oleh sumber daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Dalam lima belas tahun mendatang, komposisi penduduk usia produktif masih akan meningkat, yang berarti menjadi tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang bermutu dan berkesinambungan untuk menciptakan bangsa yang memiliki daya saing yang makin tinggi.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia – yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang secara konsisten terus membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten.

Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.



Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005-2008 dengan harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah mengakibatkan banyak rakyat merasa terancam kesejahteraannya meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Krisis keuangan global yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian global, terjadinya gejolak harga pangan dan energi di seluruh dunia, serta makin pentingnya isu perubahan iklim global dalam beberapa tahun ini, akan mengakibatkan tuntutan dan reaksi akan perubahan dasar dalam tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi global yang baru harus mengedepankan aspek kemakmuran masyarakat dunia secara bersama, merata, adil dan berkelanjutan. Untuk itu, model pembangunan ekonomi yang tidak memberikan ruang dan peran yang penting serta proporsional bagi munculnya negara-negara berkembang tidak dapat terus dipertahankan. Koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas, tanpa disertai regulasi dan pengawasan yang cukup, untuk menjaga aspek keadilan dan kepentingan masyarakat luas, harus dilakukan. Pasar harus dilindungi dari tindakan dan keputusan pelaku pasar yang sembrono dan tamak yang hanya memperhitungkan keuntungan bisnis pribadi dalam jangka pendek, dengan mengesampingkan azas kehati-hatian, kepatutan, dan keberlanjutan.

Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mengantisipasi dan harus tercermin dalam penetapan misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia, serta



dalam langkah dan peran strategis Indonesia di dunia Internasional. Hal ini untuk menjamin agar Indonesia dapat terus mencapai cita-cita kemandirian dan kemajuan dalam kemakmuran rakyatnya. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi dan transisi demokrasi yang sangat rumit dalam satu dasawarsa ini, serta kesiapan yang terus ditingkatkan dalam mengelola dampak krisis keuangan global, akan menjamin terpeliharanya momentum perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini juga menandai bangkitnya Indonesia kembali dalam kancah internasional serta memperoleh respek dunia karena kebangkitan Indonesia tersebut dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal yang mulia, yaitu azas tata kelola yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), penghormatan kepada Hak Azasi Manusia, pluralisme, demokrasi, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, serta berpartisipasi dalam tanggung jawab memelihara keseimbangan lingkungan alam dan keamanan dunia.

Di dalam negeri, tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Lapangan kerja yang tercipta harus mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik secara ekonomis maupun harkat hidup manusia (*decent jobs*). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisisen, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi di perkotaan, dan mengakibatkan tingginya urbanisasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan serta menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antara perdesaan-perkotaan, memerlukan perhatian tidak saja diberikan kepada perkotaan, namun juga perlu diberikan kepada perdesaan dengan menciptakan daya tarik wilayah perdesaan serta keterkaitan pembangunan ekonomi antara desa-kota. Pembangunan perkotaan yang difokuskan kepada sarana prasarana pelayanan publik perkotaan, harus memperhatikan pembangunan potensi sosial budaya heterogen, khususnya di kota-kota metropolitan dan kota besar. Dalam hal keterkaitan desa-kota yang dibutuhkan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan, maka pembangunan perkotaan harus memperhatikan pembangunan kota-kota menengah dan kota-kota kecil di sekitarnya.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga



penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.



Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

Wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diberikan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Dalam kaitan itu, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah yang telah berjalan selama ini harus terus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya dan melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, dengan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis



pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Demikian pula peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dilanjutkan. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah dibangun pada periode 2004-2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota, harus terus kita perluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

4.1.3 Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

- Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
- Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi



Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Pelaksanaan pembangunan pada periode 2004-2009 telah meletakkan fondasi dalam berbagai bidang perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat miskin. Beberapa landasan kebijakan tersebut adalah: (i) penyusunan data dasar (dengan nama dan alamat) rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang sangat penting untuk mengarahkan program perlindungan dan bantuan sosial; (ii) pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan untuk mempermudah dan memperjelas koordinasi; (iii) harmonisasi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri; (iv) regulasi yang mengatur koordinasi penanggulangan kemiskinan dari pusat sampai ke daerah, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya secara bersama. Adanya fondasi tersebut tercermin pada pelaksanaan program Jamkesmas, beasiswa untuk siswa miskin, Raskin, PNPM Mandiri dan Kredit untuk Usaha Rakyat. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam *Millineum Development Goals*.

Program pembangunan 2010--2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan. Pengarusutamaan ini tidak hanya terbatas antarsektor tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengarusutamaan harus juga mencakup kebijakan agar tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang minimal.

Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.



Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*). Dengan cara itu, akan diperoleh ranah pembangunan ekonomi produktif yang makin luas, antara lain, ekonomi kreatif --*creative economy*--, yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Program peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya-upaya menggerakkan sektor riil telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai intervensi pemerintah yang konstruktif dan terukur. Sedangkan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan.

Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Di sisi lain, indeks persepsi korupsi terus membaik secara signifikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan selama lima tahun terakhir telah berada pada arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih belum memadai. Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/lembaga dan penanggulangan korupsi.



Langkah-langkah yang disebutkan di atas, akan dipercepat dengan memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum.

Cakupan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta termasuk pengelolaan BUMN. Untuk mendorong perbaikan tata kelola swasta, pemerintah akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Perubahan ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik dari sektor korporasi di Indonesia. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi

Transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegagalannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu agenda penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang tetap penting dalam periode 2010-2014.

Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses checks and balances. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum. Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang egaliter.

Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai pada tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural. Di dalam proses pemilihan umum misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial

Agenda IV. Penegakan Hukum

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "rule of law." Oleh karena itu, agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia

Agenda dalam bidang hukum juga mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini, telah dan terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil. Demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundangan harus dihilangkan. Akan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Dalam usaha pemberantasan korupsi, berbagai kasus telah ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Proses penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa tebang pilih. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara benar-benar harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti.

Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan 2010-2014 mengingat pelaksanaan agenda keadilan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan yang tidak partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keadilan dan keikutsertaan secara luas belum diterapkan.



Perwujudan keadilan keikutsertaan dapat diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Upaya pengurangan kesenjangan pendapatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam periode 2004-2009 dengan berbagai kebijakan. Misalnya, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pemerintah melakukan realokasi subsidi yang diterima oleh kelompok yang berpenghasilan atas kepada masyarakat miskin melalui program-program yang bersifat langsung dan *targeted*. Realokasi subsidi BBM kepada program pendidikan dan kesehatan pada periode 2005-2008 juga merupakan bukti nyata dari upaya tersebut. Langkah konkret lain adalah pelaksanaan 3 gugus (*cluster*) program penanggulangan kemiskinan secara intensif dan koordinatif.

Proses perencanaan yang bersifat *bottom up* dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya PNPM. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah akan mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (*cluster*) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga.

Program lain yang akan dilanjutkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan adalah program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan *bottom-up* yang akan menjalar pada tingkat kabupaten dan propinsi dan seterusnya pada periode berikutnya.

4.1.4 Sasaran Pembangunan

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Pengalaman selama periode 2004-2009 menjadi modal utama dalam menyusun agenda dan strategi pembangunan ini. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian tersebut. Faktor eksogen, dapat mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Misalnya, kenaikan harga komoditas energi dapat mempunyai dampak positif terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara produsen dan pengekspor energi neto. Sebaliknya, bencana alam seperti gelombang panas El Nino seperti yang terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan dan berperan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan pada saat itu. Meskipun kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut tidak dapat diperkirakan dengan pasti, beberapa perubahan dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat.

Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2010-2014.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati-



hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara itu, di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain, ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran, dan meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Bidang energi membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*) dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan efisisensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pittsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen telah

berinisitaif memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa rencana *aksi (business as usual – BAU)* dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal.

Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah langkah-langkah yang dilakukan adalah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga adalah untuk menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak memilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

Sasaran Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.

Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Dengan demikian, reformasi kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa perbedaan dan diskriminasi.

Selain berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, pemerintah tetap mengembangkan sektor-sektor pembangunan lainnya secara konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian, pada akhir RPJMN 2010 -2014 Indonesia berhasil mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

TABEL 1
SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2010-2014

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN	
I. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1. Ekonomi			
a)	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun	
		Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%	
b)	Inflasi	Rata-rata 4 - 6 persen pertahun	
c)	Tingkat Pengangguran (terbuka)	5 - 6 persen pada akhir tahun 2014	
d)	Tingkat Kemiskinan	8 - 10 persen pada akhir tahun 2014	
2. Pendidikan			
		Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
a)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)	7,50	8,25
b)	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)	5,97	4,18
c)	Meningkatnya APM SD/SDLB/	95,14	96,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN	
	MI/Paket A (persen)		
d)	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen)	72,28	76,0
e)	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen)	64,28	85,0
f)	Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)	21,26	30,0
g)	Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		
3. Kesehatan			
		Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
a)	Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)	70,7	72,0
b)	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	228	118
c)	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	34	24
d)	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)	18,4	< 15,0
4. Pangan			
a)	Produksi Padi	Tumbuh 3,22 persen per tahun	
b)	Produksi Jagung	Tumbuh 10,02 persen per tahun	
c)	Produksi Kedelai	Tumbuh 20,05 persen per tahun	
d)	Produksi Gula	Tumbuh 12,55 persen per tahun	
e)	Produksi Daging Sapi	Tumbuh 7,30 persen per tahun	
5. Energi			
a)	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	3.000 MW pertahun	
b)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Pada tahun 2014 mencapai 80 persen	
c)	Meningkatnya produksi minyak bumi	Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari	
d)	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW	

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN
6. Infrastruktur		
a)	Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua	Hingga tahun 2014 mencapai sepanjang 19.370 km
b)	Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda	Selesai tahun 2014
c)	Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur	Selesai sebelum tahun 2013
d)	Perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)	Selesai tahun 2014
II. SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI		
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	1) Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum; 2) Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dengan indeks rata-rata 70 pada akhir tahun 2014; 3) Menyelenggarakan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, dengan tingkat partisipasi politik rakyat 75% dan berkurangnya diskriminasi hak dipilih dan memilih; 4) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi Pada tahun 2014: ► Indeks Demokrasi Indonesia: 73

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN
III. SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM		
1	Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (<i>rule of law</i>) dan terjaganya ketertiban umum.	1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum 2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum 3) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

4.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

4.2.1 Arah Kebijakan Umum

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pemerintahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, dengan tidak mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini dipandang akan memberikan hasil yang berkelanjutan karena dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, melewati proses yang telah disetujui bersama secara demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel.

Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Sebagai contoh, program BOS selama ini lebih banyak dilakukan pemerintah pusat, padahal UU Otonomi Daerah menetapkan bahwa pendidikan merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya program ini akan lebih mengedepankan dan mengaktifkan peran pemerintah daerah.

4.2.2 Prioritas Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut :

1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014;
2. Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
3. Sumber daya manusia: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011;
4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;
5. Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

Prioritas 2: Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;
2. Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014;
3. Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;
4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;
5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*);

6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

Prioritas 3: Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2014;
2. Program KB: Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;
3. Sarana kesehatan: Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012 dan 5 kota pada 2014;
4. Obat: Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;
5. Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.



Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012;
2. PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
4. Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

Prioritas 5: Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:



1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
2. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
3. Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;
5. Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
6. Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Prioritas 6: Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;
2. Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014;



3. Perhubungan: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;
4. Perumahan rakyat: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 *twin block* berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012;
5. Pengendalian banjir: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013;
6. Telekomunikasi: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat;
7. Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;
2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);



3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;
4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh *National Single Window* (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama *Custom Advanced Trade System* (CATS) di *dry port* Cikarang;
5. KEK: Pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012;
6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

Prioritas 8: Energi

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional;
2. Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya;
3. Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014;
4. Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif *geothermal* sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi *coal bed methane* untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, *microhydro*, serta nuklir secara bertahap;



5. Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;
6. Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh di antaranya melalui kerja sama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi;
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya;
3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;
4. Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.



Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan substansi inti sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011;
2. Kerjasama internasional: Pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan;
3. Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;
4. Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.

Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi adalah sebagai berikut:

1. Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
2. Sarana: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012;
3. Penciptaan: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas;



4. Kebijakan: Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;
5. Inovasi teknologi: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Pada dasarnya kesebelas Prioritas Nasional di atas merupakan upaya untuk :

Pertama, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik (meliputi Prioritas 5 Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik).

Kedua, Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha)

Ketiga, Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)

Keempat, Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi).

Prioritas Lainnya

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme; (b) pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; (c) peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; (d) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri; (e) penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (f) pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor; (g) pengembalian aset (*asset recovery*); (h) peningkatan kepastian hukum; (i) penguatan perlindungan HAM; dan (i) pemberdayaan industri strategis pertahanan.

Di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia

(TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup: (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; (d) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; (e) perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (f) peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia; (g) perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (*mainstreaming*) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; (h) pencapaian posisi papan atas pada *South East Asia (SEA) Games* pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (i) peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta (j) revitalisasi gerakan pramuka.

4.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tata ruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat



berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

4.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Strategi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam kerangka sinergi pusat-daerah dan antardaerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif, serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sehingga mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebut dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara



keseluruhan disebut dana perimbangan (DP), serta dana otonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

Selain itu, dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; (2) sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah akan dilakukan upaya percepatan reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, melaksanakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan pelaksanaan 11 prioritas nasional, arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran 11 prioritas nasional sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah.

4.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

I. Pengembangan Wilayah Sumatera

Wilayah pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah satu pusat perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; lumbung energi nasional, pusat perdagangan dan pariwisata sehingga wilayah Sumatera menjadi salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan, pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal; (2) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (3) mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, baik pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (5) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya dalam rangka mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga; (6) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; (7) mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia; (8) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.

Pusat-pusat pengembangan di wilayah Sumatera yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan kota Padang di wilayah Barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dan sekitarnya (dsk), dan Palembang dsk,



sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder.

II. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki tantangan yang kompleks. Wilayah Jawa Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya. Namun, dalam 20 tahun ke depan Wilayah Jawa Bali akan menghadapi berbagai isu strategis. *Pertama*, peningkatan jumlah penduduk perkotaan. *Kedua*, perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada peningkatan sektor jasa. *Ketiga*, menurunnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. *Keempat*, meningkatnya kelas menengah yang disertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak-hak dasar. *Kelima*, pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal. Berbagai isu strategis tersebut akan mempunyai implikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumberdaya, tata ruang, budaya dan politik.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan regional Jawa-Bali diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional, mengembangkan industri pengolahan secara terkendali, memperkuat interaksi perdagangan, serta meningkatkan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional sebagai wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan RTRWN, pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; (3) mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; (4) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali; (8) mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; (9) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.



Pusat-pusat pengembangan di Wilayah Jawa-Bali yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan perkotaan Jabodetabek, Bandung, Gerbangkertosusila, dan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan perkotaan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

III. Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah tengah Indonesia, berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar di Indonesia. Di sebelah utara, wilayah Kalimantan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Posisi ini sangat penting mengingat dalam konteks penguatan keterkaitan antarwilayah.

Pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk: (1) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillippines East ASEAN Growth Area*); (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian



lingkungan hidup; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Kalimantan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; (2) mendorong pengembangan kota Palangka Raya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder. Selanjutnya, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Pulau Kalimantan terutama kawasan perbatasan negara diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.

IV. Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan wilayah Sulawesi, sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia dan sub-regional ASEAN. Dengan kondisi ini, wilayah Sulawesi memiliki akses perdagangan yang cukup strategis.

Pembangunan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Sesuai dengan RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawasankawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset



sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai aset sosialbudaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal; (9) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; dan (10) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pusat-Pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado - Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder.

V. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang terletak di sebelah timur wilayah Jawa-Bali belum sepenuhnya mendapat manfaat dari interaksi ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi nasional tersebut.

Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh–Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana Toraja; (5) menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik



antarwilayah maupun antarkawasan; (6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; (8) mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai 'beranda depan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pusat pengembangan di Wilayah Nusa Tenggara yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

VI. Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan wilayah Kepulauan Maluku, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Pengembangan PKN di Kepulauan Maluku diarahkan untuk mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

VII. Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah.

Pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia; produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai RTRWN, pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan; (6) menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Papua yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) mendorong pengembangan kota Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Laut

Pengembangan wilayah laut dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek geologi, oseanografi, biologi atau



keragaman hayati, habitat, potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi. Pendekatan ini merupakan sinergi dari pengembangan pulau-pulau besar dalam konteks pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah.

Pengembangan wilayah laut didasarkan pada sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain. Melalui pendekatan ini, pengembangan wilayah laut dikelompokkan sebagai berikut: (1) wilayah pengembangan kelautan Sumatera; (2) wilayah pengembangan kelautan Malaka; (3) wilayah pengembangan kelautan Sunda; (4) wilayah pengembangan kelautan Jawa; (5) wilayah pengembangan kelautan Natuna; (6) wilayah pengembangan kelautan Makassar-Buton; (7) wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku; (8) wilayah pengembangan kelautan Sawu, dan (9) wilayah pengembangan kelautan Papua-Sulawesi. Dari sepuluh wilayah pengembangan kelautan ini, dengan memperhatikan fungsi strategisnya dalam penguatan keterkaitan antarwilayah maka dipilih lima wilayah prioritas pengembangan untuk periode 2010-2014 yaitu Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera, Malaka, Jawa, Makassar-Buton, dan Banda-Maluku.

I. Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera

Wilayah pengembangan kelautan Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari Sabang di bagian utara hingga Lampung di bagian selatan. Potensi perikanan meliputi ikan hias di Pulau Breuh dan Sibolga, ikan kakap, kerapu, kerang-kerangan, teripang, dan tiram merata di bagian barat Sumatera. Di samping itu juga terdapat potensi rumput laut di pesisir Painan dan Lampung. Aneka jenis terumbu karang dapat ditelusuri di Kepulauan Simeulue dan Mentawai. Potensi migas ditemukan di Cekungan Busur Muka lepas pantai Bengkulu serta potensi pasir besi di sepanjang pantai Padang. Potensi wisata bahari dan budaya sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Nias dan Mentawai. Wilayah ini hanya dilewati oleh satu jalur pelayaran nasional dan nusantara, namun wilayah perbatasan internasional di bagian barat merupakan jalur pelayaran internasional yang cukup sibuk.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Sumatera adalah pengembangan industri berbasis kelautan, khususnya pengolahan hasil laut, dengan memperkuat keterkaitan dengan wilayah Jawa. Strategi yang ditempuh adalah: (1) penyiapan sumber daya manusia terampil di bidang kelautan; (2) pembangunan transportasi laut dan wilayah pesisir; (3) peningkatan kapasitas energi listrik; (4) pengembangan skema pembiayaan perbankan yang mudah diakses nelayan dan pelaku usaha kecil menengah di kawasan pesisir; (5) dan fasilitasi pengembangan sistem jaminan atau perlindungan risiko.



Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sumatra dan Jawa-Bali.

II. Wilayah Pengembangan Kelautan Selat Malaka

Secara geografis wilayah pengembangan kelautan Selat Malaka terbentang dari perairan Selat Malaka hingga Kepulauan Riau, serta berbatasan dengan perairan Aceh di utara, perairan Malaysia dan Singapura di timur, wilayah pengembangan kelautan Natuna di selatan, dan daratan Sumatera di barat. Wilayah ini merupakan jalur pelayaran internasional yang padat dan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya konflik dengan negara tetangga. Potensi granit tua dan endapan pasir ditemukan di Kepulauan Riau. Potensi timah terdapat di Kepulauan Singkep, sedangkan pasir kuarsa yang cukup besar ditemukan di lepas pantai Riau dekat Pulau Rupat. Wilayah ini memiliki potensi perikanan budidaya (kakap putih, kerapu, kerang-kerangan, teripang, tiram, dan rumput laut. Potensi perikanan tangkap (ikan hias) juga ditemukan di sekitar Pulau Sabang dan Pulau Bintan. Keragaman hayati di perairan ini dicirikan oleh keluarga Moluska dan Teripang serta spesies penyu. Habitat terumbu karang didominasi oleh terumbu karang tepi (*fringing reef*). Namun, padatnya aktivitas pelayaran dan eksplorasi migas di wilayah ini menghadirkan ancaman polusi pencemaran minyak dan limbah lainnya.

Pengembangan wilayah kelautan Selat Malaka diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan ekosistem laut sehingga pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan secara optimal. Untuk itu strategi yang diperlukan adalah: (1) penegasan batas-batas teritorial dan yuridiksi wilayah dengan negara tetangga; (2) peningkatan pengawasan kawasan perbatasan untuk menghindari penyelundupan, perompakan, illegal fishing, dan perdagangan pasir ilegal; (3) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (4) pemanfaatan pulau-pulau terdepan sebagai kawasan wisata atau pusat konservasi satwa laut.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sumatra dan Jawa-Bali.

III. Wilayah Pengembangan Kelautan Jawa

Wilayah pengembangan kelautan Jawa terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Di sebelah timur wilayah ini berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar dan di barat berbatasan dengan Pulau Sumatera. Karena terletak di wilayah laut dalam di antara pulau-pulau besar, perairan ini merupakan jalur pelayaran nasional dan nusantara yang padat. Pelayaran internasional juga melintasi bagian timur perairan ini. Ancaman turunnya kualitas lingkungan berasal dari pencemaran minyak dan limbah yang dialirkan sungai-sungai di Pulau Jawa.

Pengembangan wilayah perairan ini diarahkan pada penguatan fungsi wilayah kelautan sebagai perekat integrasi ekonomi antarwilayah (antarpulau) dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut untuk mempermudah arus barang antarpulau khususnya ke wilayah timur Indonesia; (2) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (3) pengendalian pembuangan limbah industri dan rumah tangga melalui sungai-sungai yang bermuara di perairan Jawa; (4) pengendalian erosi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) untuk menghindari pendangkalan pelabuhan ikan dan pelabuhan laut; (5) pengembangan perikanan budidaya; dan (6) minimalisasi risiko pencemaran perusakan habitat laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan.

IV. Wilayah Pengembangan Kelautan Makassar-Buton

Secara geografis, wilayah pengembangan kelautan Makassar diapit oleh Pulau Sulawesi di sebelah timur dan Pulau Kalimantan di sebelah barat. Kecuali Selat Makassar, tingkat pemanfaatan potensi perikanan masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Dari sisi sistem transportasi, wilayah ini dilalui jalur pelayaran nasional dan Nusantara yang cukup aktif. Di samping itu Selat Makassar juga dilintasi jalur pelayaran internasional yang cukup padat.

Kebijakan pengembangan wilayah ini diarahkan pada optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional

untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

V. Wilayah Pengembangan Kelautan Banda-Maluku

Wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI), berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Papua di utara, dengan daratan Pulau Papua di timur, dengan wilayah pengembangan kelautan Sawu di selatan, dan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar di barat. Potensi migas ditemukan di daerah kepala burung, Seram dan Halmahera. Bahan semen juga ditemukan di Pulau Misool. Namun demikian wilayah ini baru dilayani beberapa jalur pelayaran nasional dan nusantara. Dengan demikian ancaman pencemaran laut masih rendah, terlihat dari relatif terjaganya keragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini merupakan tempat bertelur beberapa spesies seperti penyu-penyuan. Potensi perikanan dan budidaya rumput laut juga sangat tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah. Karakter gugus-gugus pulau yang khas juga merupakan potensi wisata alam wilayah ini seperti ditemukan di perairan Raja Ampat.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Banda-Maluku adalah perintisan pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata bahari. Sejalan dengan arah ini, strategi yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sumber daya manusia berkecakupan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; (6) pengembangan wisata bahari.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

4.4.3. Pengembangan Kawasan

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi;
2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain;
3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga;
4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (*urban sprawl & conurbation*), seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa;
5. Mempercepat pembangunan kota-kota kecil dan menengah terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya;
6. Mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi;'
7. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;
8. Mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam, mengingat secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan bencana alam.



BAB V

KERANGKA EKONOMI MAKRO 2010—2014

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam lima agenda pembangunan dan pembiayaan pembangunannya.

5.1 Keadaan Ekonomi 2009

Secara umum kondisi ekonomi makro pada tahun 2009 adalah sebagai berikut Pertama, perekonomian nasional sedikit menurun setelah mendapatkan imbas global akibat krisis keuangan dunia pada 2008 namun tetap tumbuh cukup tinggi. Pada pertengahan 2009 perekonomian nasional telah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia dan mulai naiknya harga-harga komoditi internasional; Kedua, konsumsi domestik sejak awal 2009 menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat, kegiatan kampanye Pemilu, dan juga upaya mempercepat penyerapan anggaran; Ketiga, sebagian besar indikator ekonomi domestik menguat sejak awal 2009, seperti keyakinan konsumen meningkat, penjualan barang ritel dan otomotif membaik, aktivitas industri kembali meningkat setelah mengalami penurunan pada akhir tahun 2008.

Dampak krisis global mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun minus 3,6 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2008 (q-t-q) atau meningkat 5,2 persen (y-o-y), sementara itu pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh positif, yaitu 6,2 persen pada triwulan I; 6,4 persen pada triwulan II; dan 6,4 persen pada triwulan III (y-o-y). Krisis global—yang berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan komoditas—menyebabkan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada triwulan IV tahun 2008 dibanding triwulan sebelumnya. Dampak global juga mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri, sehingga investasi/Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada triwulan IV dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,4 persen dan pada triwulan II laju pertumbuhan menurun menjadi 4 persen. Pada triwulan III tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,2 persen yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2009 tumbuh 4,2

persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing masing tumbuh 15,1 persen dan 5,2 persen. Sementara itu ekspor masih tumbuh negatif, yaitu 14,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tinggi terutama didorong oleh sektor pertanian meningkat sebesar 3,4 persen; dan sektor tersier, yaitu sektor listrik, gas dan air; dan pengangkutan dan telekomunikasi yang masing masing tumbuh 13,9 persen dan 17,6 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikategorikan memiliki kinerja perekonomian yang baik mengingat banyak negara yang pertumbuhannya negatif, sementara itu Indonesia tumbuh positif 4 persen bersama Cina dan India yang masing masing tumbuh 7,9 persen dan 6,1 persen pada triwulan II tahun 2009.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, upaya untuk mengurangi kemerosotan ekspor dan lambatnya pertumbuhan investasi semakin ditingkatkan. Di samping itu, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan memelihara daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Efektivitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan sekitar 4,3 persen.

Dari sisi moneter, setelah mengalami tekanan akibat gejolak ekonomi dunia tahun 2008, perkembangan indikator moneter diperkirakan akan terus membaik sampai akhir 2009. Laju inflasi yang mencapai 11,1 persen pada tahun 2008 menurun menjadi 2,8 persen pada akhir tahun 2009, seiring dengan menurunnya harga-harga komoditas dunia, penurunan harga BBM dalam negeri, membaiknya ekspektasi inflasi serta terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik. Meskipun nilai tukar rupiah agak melemah menjadi Rp 10.950,00/USD pada awal 2009, secara bertahap menguat kembali menjadi Rp 9.400,00/USD pada akhir 2009. Penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh neraca pembayaran yang surplus, imbal hasil rupiah yang menarik, premi resiko yang menurun, melemahnya mata uang dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia, serta meningkatnya keyakinan investor global terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2009, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk memberi stimulus kepada perekonomian namun dengan terus menjaga ketahanannya. Hal ini dilakukan mengingat dampak terberat dari krisis ekonomi global diperkirakan terjadi pada tahun 2009. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang ditempuh ditujukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dengan memperluas program stimulus ekonomi melalui APBN 2009; melakukan perubahan asumsi dasar untuk memberikan sinyal yang tepat kepada publik; serta melakukan beberapa penyesuaian terhadap besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran.

Arah kebijakan stimulus fiskal yang ditempuh bertujuan untuk: (i)

mempertahankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui berbagai insentif perpajakan dan pemberian subsidi, serta bantuan langsung tunai; (ii) mencegah timbulnya PHK secara luas dan meningkatkan daya tahan usaha dalam menghadapi krisis antara lain melalui penurunan berbagai tarif perpajakan dan bea masuk, potongan tarif listrik, subsidi bunga, serta pemberian kredit usaha rakyat; (iii) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan belanja infrastruktur padat karya melalui penambahan anggaran untuk infrastruktur; serta (iv) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meneruskan reformasi di seluruh kementerian/lembaga (K/L).

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, pendapatan negara dan hibah mencapai sekitar Rp 866,8 triliun atau 16,3 persen PDB, lebih rendah Rp 118,9 triliun bila dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2009, yaitu sebesar Rp 985,7 triliun atau 18,5 persen PDB. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan penerimaan dalam negeri, baik berupa penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak sebagai dampak dari krisis ekonomi global.

Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp 954,0 triliun atau 17,9 persen PDB, yang lebih rendah Rp 83,1 triliun apabila dibandingkan dengan anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2009 yang besarnya Rp 1.037,1 triliun atau 19,5 persen PDB. Penurunan anggaran belanja tersebut antara lain disebabkan oleh beban belanja subsidi yang menurun menjadi Rp 159,5 triliun atau 3,0 persen PDB dari Rp 166,7 triliun atau 3,1 persen PDB yang ditetapkan dalam APBN 2009. Penurunan subsidi ini disebabkan oleh perubahan asumsi harga minyak yang cukup besar dari US\$80 per barel menjadi US\$61,6 per barel.

Perkembangan penerimaan dan belanja negara di atas, mendorong peningkatan defisit anggaran dalam tahun 2009 menjadi sebesar 1,6 persen PDB, atau meningkat sebesar 0,6 persen PDB jika dibandingkan dengan defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 yang besarnya 1,0 persen PDB. Selanjutnya stok utang pemerintah dapat diturunkan menjadi sebesar 30,0% PDB.

Menjelang akhir tahun 2009, proses pemulihan ekonomi dunia terus menunjukkan peningkatan dan berdampak positif terhadap kinerja sektor eksternal pada keseluruhan tahun 2009. Kondisi Neraca Pembayaran sampai triwulan III tahun 2009 terjaga. Total nilai ekspor sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 84,1 miliar atau turun 23,4 persen jika dibanding dengan triwulan III tahun 2008. Total nilai impor sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 91,1 miliar atau menurun 33,3 persen dibanding triwulan III tahun 2008. Secara keseluruhan, neraca transaksi berjalan sampai triwulan III tahun 2009 mengalami surplus sebesar USD 7,4 miliar. Pada triwulan II tahun 2009 arus modal dan finansial mengalami defisit, namun sampai dengan triwulan III tahun 2009 secara keseluruhan arus modal dan finansial surplus sebesar USD 4,7 miliar, surplus ini didorong oleh arus masuk investasi langsung asing sebesar USD 3,8 miliar serta arus masuk investasi portfolio sebesar USD 6,6 miliar,



sedangkan investasi lainnya (neto) masih mengalami defisit sebesar USD 5,6 miliar. Neraca keseluruhan sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 8,6 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 62,3 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, dan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 8,39 persen pada tahun Agustus 2008 menjadi 7,87 persen Agustus 2009 dan tingkat kemiskinan menurun dari 15,4 persen di tahun 2008 (Maret) menjadi 14,1 persen pada tahun 2009 (Maret).

5.2 Prospek Ekonomi 2010-2014

5.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2010-2014 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan eksternal. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan 2008, tanda tanda pemulihan ekonomi dunia telah sudah mulai terlihat sejak akhir 2009. IMF (Oktober 2009) telah melakukan revisi terhadap prospek ekonomi global pada tahun 2009 dari tumbuh negatif -1,4 persen menjadi -1,1 persen; dan pada tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari perkiraan awal dari tumbuh 2,5 persen menjadi 3,1 persen. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah (i) mendorong sisi permintaan dan (ii) mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Meskipun pemulihan telah terjadi, perekonomian global masih menghadapi tantangan dalam lima tahun ke depan, yaitu: (i) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (ii) tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (iii) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia.

TABEL 2
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI
2010 - 2014
(Dalam Persen)

	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata 2010- 2014
Pertumbuhan Ekonomi	5,5-5,6	6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7	6,3-6,8
Sisi Pengeluaran						
Konsumsi Masyarakat	5,2-5,2	5,2-5,3	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4
Konsumsi Pemerintah	10,8-10,9	10,9-11,2	12,9-13,2	10,2-13,5	8,1-9,8	10,6-11,7
Investasi	7,2-7,3	7,9-10,9	8,4-11,5	10,2-12,0	11,7-12,1	9,1-10,8
Ekspor Barang dan Jasa	6,4-6,5	9,7-10,6	11,4-12,0	12,3-13,4	13,5-15,6	10,7-11,6
Impor Barang dan Jasa	9,2-9,3	12,7-15,2	14,3-15,9	15,0-16,5	16,0-17,4	13,4-14,9
Sisi Produksi						
Pertanian, Perkebunan, Pernakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,3-3,4	3,4-3,5	3,5-3,7	3,6-3,8	3,7-3,9	3,6-3,7
Pertambangan dan Penggalian	2,0-2,1	2,1-2,3	2,3-2,4	2,4-2,5	2,5-2,6	2,2-2,4
Industri Pengolahan	4,2-4,3	5,0-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3	5,5-6,0
Industri Bukan Migas	4,8-4,9	5,6-6,1	6,3-7,0	6,8-7,5	7,1-7,8	6,1-6,7
Listrik, Gas dan Air	13,4-13,5	13,7-13,8	13,8-13,9	13,9-14,0	14,1-14,2	13,8-13,9
Konstruksi	7,1-7,2	8,4-8,5	8,8-9,3	8,9-10,1	9,1-11,1	8,4-9,2
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4,0-4,1	4,2-4,8	4,4-5,2	4,5-6,4	4,6-6,6	4,3-5,4
Pengangkutan dan Telekomunikasi	14,3-14,8	14,5-15,2	14,7-15,4	14,9-15,6	15,1-16,1	14,7-15,4
Kuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	6,5-6,6	6,6-6,7	6,8-7,0	6,9-7,0	7,2-7,3	6,8-6,9
Jasa-jasa	6,7-6,9	6,9-7,0	7,0-7,1	7,1-7,2	7,2-7,4	6,9-7,1

Walaupun diperkirakan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global dari barat ke timur (west to east), perekonomian Amerika Serikat dan negara industri maju lainnya masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar komoditi ekspor negara berkembang. Perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina, India dan negara negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal.

Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang dilakukan di berbagai bidang, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya; pemulihan ekonomi di Asia yang membaik pada triwulan terakhir 2009 serta pemulihan ekonomi dunia pada tahun

2010 yang lebih baik; ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga dalam menghadapi krisis keuangan dan penurunan ekonomi global; ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan lima tahun mendatang, dan perkiraan lingkungan eksternal pada tahun 2010-2014 maka perekonomian dapat dijaga secara berkelanjutan dengan prospek ekonomi makro tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Selama kurun waktu 2010-2014 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh secara bertahap dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0-7,7 persen pada tahun 2014 atau dengan rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun selama lima tahun.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, serta investasi dan ekspor barang dan jasa. Konsumsi masyarakat diproyeksikan pada tingkat pertumbuhan 5,3-5,4 persen per tahun, sedangkan investasi dan ekspor diharapkan akan meningkat secara bertahap mulai tahun 2010 setelah mengalami pertumbuhan negatif. Investasi diperkirakan tumbuh rata-rata 9,1-10,8 persen dan ekspor barang dan jasa meningkat rata-rata 10,7-11,6 persen per tahun.

Konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi; dan peningkatan fasilitas investasi. Ekspor terus dipacu pertumbuhannya dengan berbagai kebijakan, antara lain: peningkatan akses pasar internasional terutama pasar non tradisional; peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor; dan peningkatan fasilitas ekspor.

Dari sisi produksi, setelah mengalami pertumbuhan rendah selama 2004-2009, pertumbuhan industri pengolahan non migas akan didorong kembali sebagai penggerak pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 6,1-6,7 persen. Upaya mendorong pertumbuhan industri dilakukan dengan kebijakan penumbuhan populasi usaha industri, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas usaha industri. Sementara itu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diperkirakan tumbuh rata-rata 3,6-3,7 persen per tahun, dengan kebijakan antara lain mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, serta peningkatan pendapatan petani.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini, kesejahteraan rakyat akan senantiasa bisa ditingkatkan.

5.2.2. Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Dalam jangka menengah, terutama melalui kebijakan Inflation Targetting Framework dan koordinasi kebijakan makro antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, laju inflasi diarahkan untuk menurun secara bertahap dengan besaran sekitar 4 – 6 persen. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkat

inflasi yang cukup rendah dan stabil tetapi tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya nilai tukar, yang dimungkinkan dengan perkiraan masuknya dana investasi luar negeri (capital inflow), baik investasi di sektor keuangan (pasar modal) maupun di sektor riil, akibat meningkatnya iklim usaha dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga.

Terkendalnya laju inflasi memberi dorongan bagi penurunan tingkat suku bunga perbankan, yang juga dipengaruhi oleh tingkat risiko dunia usaha. Meskipun tingkat suku bunga perbankan domestik juga akan dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga utama internasional pada masa mendatang namun, dalam jangka menengah diharapkan akan terus menurun secara bertahap sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi.

Di sisi pengelolaan keuangan negara, ketahanan fiskal yang membaik harus terus dipertahankan. Ketahanan fiskal harus terus diperkuat demi mendukung pencapaian stabilitas ekonomi. Di sisi penerimaan negara, dengan dilanjutkannya berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak diharapkan penerimaan pajak meningkat rata-rata sebesar 16,8 persen tiap tahunnya selama periode 2010-2014. Di sisi belanja negara, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk transfer ke daerah rata-rata sebesar 14,0 persen. Di samping itu, selama periode 2010-2014 anggaran belanja pegawai diperkirakan meningkat, seiring dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan pemerintah.

Terkait dengan upaya mengatasi ancaman krisis ekonomi, defisit APBN 2009 masih cukup tinggi hingga mencapai 1,6 persen PDB seiring dengan pemberian stimulus fiskal. Namun dengan kebijakan yang terus berlanjut, seperti peningkatan pendapatan dan optimalisasi belanja negara, serta pulihnya kondisi perekonomian, selama lima tahun ke depan defisit APBN diperkirakan mampu turun menjadi sekitar 1,2 persen PDB.

Sementara itu untuk pembiayaan defisit, strategi diarahkan dalam rangka pencapaian 3 sasaran utama yaitu: (a) penurunan rasio stok utang terhadap PDB; (b) penggunaan utang secara selektif; (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta. Dengan demikian, rasio stok utang terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkan mencapai sekitar 24 persen pada tahun 2014.

Perkiraan neraca pembayaran didasarkan atas dua asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi perkembangan ekonomi dunia mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama negara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antara valuta

negara industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan dan pola pertumbuhan ekonomi, perkiraan pertumbuhan investasi, serta perkiraan sumber pembiayaan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Walaupun persaingan di pasar internasional semakin ketat, dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi dunia pada tahun 2010—setelah mengalami krisis keuangan global sejak pertengahan 2008—dan didorong oleh pemanfaatan peningkatan daya saing serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekspor, maka nilai ekspor nonmigas dalam periode 2010-2014 diperkirakan meningkat bertahap. Setelah mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2009, ekspor non migas pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh 7-8 persen hingga mencapai 14,5-16,5 persen pada tahun 2014.

Dari sisi impor, permintaan domestik yang meningkat akan mendorong kembali kebutuhan impor non migas dari 8-9 persen pada tahun 2010 menjadi 18-19 persen pada tahun 2014. Dengan defisit jasa-jasa yang diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2010 hingga tahun 2014, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan menurun hingga tahun 2014.

Investasi asing langsung (foreign direct investment) neto diperkirakan terus meningkat dalam kurun waktu 2010—2014 sedangkan arus modal asing dalam bentuk portfolio diperkirakan tetap terjaga. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa diperkirakan meningkat menjadi sekitar USD 100 miliar pada tahun 2014.

5.2.3. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antara lain kebijakan dalam ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan tambahan angkatan kerja baru rata-rata sebesar 2 juta orang per tahun, pengangguran terbuka diperkirakan dapat diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada tahun 2014. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin diperkirakan terus berkurang dari 14,1 persen (Maret 2009) hingga mencapai 8 – 10 persen di tahun 2014.

Pembangunan nasional yang dilakukan di berbagai bidang melalui berbagai prioritas sebagaimana diuraikan di atas, masih menyisakan berbagai kesenjangan yang menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Hal tersebut antara lain tercermin pada permasalahan sebagai berikut. Pertama, tingkat kemiskinan antarprovinsi yang masih cukup tinggi perbedaannya. Sebagai contoh DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan sebesar 3,6 persen, sementara di provinsi Papua tingkat kemiskinan pada tahun 2009 mencapai 37,5 persen. Kedua, tingkat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar antarkelompok masyarakat juga masih memiliki perbedaan yang cukup besar. Kelompok masyarakat dengan pendapatan 40 persen terendah masih mengkonsumsi kalori di bawah 2.100 kkal/kapita/hari, yang merupakan persyaratan minimum

kecukupan kalori. Layanan kesehatan melalui Puskesmas dan dokter juga masih rendah. Demikian pula untuk akses terhadap air bersih. Ketiga, penyerapan tenaga kerja baru sebagian besar adalah berupa pekerja informal, yang biasanya tergantung pada usaha kecil dan mikro yang memiliki keterbatasan terhadap akses sumber daya produktif untuk mengembangkan usahanya. Keempat, kesetaraan gender di berbagai bidang masih terbatas. Sementara peran perempuan dalam peningkatan kualitas keluarga, di dalam kegiatan ekonomi serta berbagai bidang lainnya sangat besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif termasuk menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan serta masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi, dilakukan kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana diuraikan di dalam Prioritas Penanggulangan Kemiskinan agar dapat melayani dan menjangkau masyarakat miskin, yang selama ini memiliki tingkat pendapatan yang rendah serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Arah kebijakan yang tercermin dalam berbagai fokus di dalam prioritas tersebut merupakan langkah keberpihakan terhadap masyarakat yang masih memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Program-program bantuan sosial berbasis keluarga dilakukan untuk membantu kelompok masyarakat ini, agar mereka tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang masih rendah dapat ditingkatkan dan kesenjangan akses antar kelompok pendapatan akan dapat dikurangi. Selanjutnya, program bantuan sosial ini juga akan lebih memperhatikan kelompok masyarakat penyandang cacat, lansia terutama yang berasal dari keluarga miskin, anak terlantar, serta masyarakat terpinggirkan, agar mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dan layanan dasar serta sumber daya produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara itu, program PNPM Mandiri dikhususkan untuk membantu masyarakat bersama penduduk miskin agar mereka berdaya dan akhirnya mampu berpartisipasi aktif dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan pada gilirannya mampu berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya secara lebih luas. Selanjutnya, program dalam cluster Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro juga diarahkan untuk dapat membantu pekerja informal, sehingga mereka memiliki akses yang sama untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Secara keseluruhan program-program dalam tiga cluster penanggulangan kemiskinan ditingkatkan efektivitasnya untuk dapat meningkatkan jangkauan dan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar bagi masyarakat miskin, penyandang cacat, lansia dan terpinggirkan sehingga proses pembangunan dapat mengikutsertakan seluruh komponen bangsa dan hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat dan pada akhirnya dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Kedua, peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga sangat besar terutama dalam keluarga miskin, baik melalui peningkatan kegiatan ekonomi

maupun dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, peran mereka dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga masih terbatas. Keterbatasan terjadi karena minimnya wawasan dan kemampuan mereka. Hambatan lain adalah karena wanita belum mendapatkan tempat dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Bahkan banyak wanita yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula, anak yang seharusnya menjadi generasi muda berkualitas agar dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan antar generasi belum mendapatkan perlindungan dan kesempatan di masa mudanya sebagai fondasi untuk membangun masa depannya. Sehubungan dengan itu, perhatian khusus melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada perempuan dan anak terus dilakukan, terutama pembinaan anak-anak terlantar yang tidak memiliki keluarga dan orang tua yang dapat membantu mereka untuk membangun masa depan demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Kebijakan dan program untuk memberi perhatian pada perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan dan program dalam Prioritas Nasional lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Ketiga, sebagian besar masyarakat miskin berada di daerah perdesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur, dan sebagian dari mereka berada di daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi, termasuk daerah perbatasan yang sebagian besar jauh dari ibu kota wilayah kabupaten dan kota lainnya. Untuk itu, pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan program penting yang akan dilakukan untuk memberi kesempatan sama kepada masyarakat di daerah perdesaan, dan daerah terpencil dan terisolasi. Berkaitan dengan itu, pembangunan daerah perbatasan memerlukan perhatian khusus, sehingga masyarakat di daerah perbatasan akan memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya untuk menikmati hasil pembangunan dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kebijakan dan program yang diarahkan untuk ini semua dilakukan melalui Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.

Berbagai kebijakan dan program untuk mengikutsertakan seluruh lapisan dan berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah, akan didukung dengan penyempurnaan berbagai mekanisme keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini mekanisme keuangan ke daerah dilakukan melalui DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil. Mekanisme keuangan ini terus disempurnakan dan dilengkapi dengan berbagai instrumen yang akan mendukung proses pembangunan yang sudah lebih terdesentralisasi ke daerah, serta meningkatkan kualitas pendanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi proses perumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan membangun konsensus pemihakan kepada masyarakat yang masih tertinggal. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Kebijakan yang afirmatif akan berhasil apabila didukung dengan koordinasi dan proses

konsultasi yang efektif antar para pemangku kepentingan.

5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, kebijakan pendanaan investasi diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan mengoptimalkan pendanaan pembangunan menuju kemandirian pendanaan pembangunan. Dalam kaitan itu, strategi utama pendanaan pembangunan adalah (i) optimalisasi sumber dan skema pendanaan pembangunan baik yang telah ada maupun yang akan dikembangkan, dan (ii) peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3–6,8 persen pertahun dibutuhkan total investasi kumulatif selama lima tahun sebesar Rp 11.913,2-Rp 12.462,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, sekitar 18 persen pada tahun 2014 diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pembiayaan belanja pemerintah diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dapat berasal dari hibah, pembiayaan luar negeri, dan pembiayaan dalam negeri. Sisa kebutuhan investasi dapat dipenuhi oleh dunia usaha dan masyarakat yang berasal dari perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, laba ditahan, dan lainnya. Peningkatan proporsi pendanaan investasi dunia usaha diharapkan terutama terjadi pada komponen PMA dan PMDN sejalan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan pasar modal sejalan perbaikan regulasi, dan penguatan manajemen pasar modal, serta meningkatnya tata kelola dan kinerja perusahaan.

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, pemerintah terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium-Term Expenditure Framework* (MTEF) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), antara lain melalui restrukturisasi program dan kegiatan, serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur.
2. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan perencanaan dengan penganggaran Pemerintah Pusat melalui penyempurnaan penyusunan RPJMN, Renstra, RKP, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan lainnya. Demikian pula Pemerintah Daerah untuk RPJMD, Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, dan lainnya.
3. Menyusun alokasi belanja yang lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melipatgandakan kegiatan

perekonomian domestik dan mampu menciptakan lapangan kerja yang tinggi serta mendukung peningkatan kualitas layanan.

4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
5. Menyempurnakan mekanisme pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat, dan akuntabel.

Sumber pembiayaan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman luar negeri (PHLN), terus diupayakan dengan tetap mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional serta meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN harus dilihat tidak hanya dari sisi pendanaan tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Sumber pendanaan melalui hibah luar negeri dapat berasal dari mitra pembangunan internasional, baik negara maupun lembaga/badan internasional. Walaupun hibah sebagai penerimaan negara mempunyai proporsi yang kecil, namun sifat hibah yang tidak memiliki resiko pengembalian merupakan sumber pendanaan yang potensial untuk dimanfaatkan. Dalam upaya optimalisasi penggunaan hibah, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas lembaga penerima hibah dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan mengenai tata kelola hibah pemerintah yang lebih kondusif dan fleksibel namun tetap akuntabel disesuaikan dengan karakteristik hibah.

Sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman program maupun pinjaman proyek yang berasal dari lembaga multilateral, bilateral dan lembaga keuangan komersial. Sehubungan dengan meningkatnya peringkat Indonesia sebagai negara Lower Middle Income Country (LMIC) maka sumber pinjaman yang sangat murah dari lembaga keuangan multilateral sudah tidak dapat diperoleh lagi. Karena itu, pengelolaan pinjaman luar negeri semakin diperkuat dan pemanfaatannya semakin dioptimalkan.

Untuk mengurangi beban utang pemerintah, maka rasio stok utang pemerintah, termasuk utang luar negeri, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten akan diturunkan hingga mencapai sekitar 24% pada akhir tahun 2014 dengan tetap menjaga target negative net transfer. Pengelolaan utang Pemerintah akan terus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan efektivitas pengelolaan portofolio, diversifikasi sumber-sumber utang, pengembangan skema pendanaan utang yang lebih aman dan pengelolaan resiko utang pemerintah.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar

negeri, dilakukan upaya (i) penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan mengenai perencanaan dan pengelolaan PHLN pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Peraturan Menteri PPN No. 05/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri), (ii) peningkatan kualitas perencanaan dan kapasitas pelaksanaan proyek antara lain melalui penegakan aturan kesiapan proyek, penajaman fokus pemanfaatan PHLN yang lebih selektif untuk membiayai atau mendukung program/kegiatan prioritas nasional, (iii) peningkatan penggunaan sistem nasional (alignment) dan harmonisasi kegiatan mitra-mitra pembangunan, (iv) penguatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Pemerintah terus meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) bersama-sama mitra pembangunan dengan melaksanakan secara konsisten agenda Paris Declaration, yang telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Jakarta Commitment.

Pembiayaan dalam negeri Pemerintah terdiri dari pembiayaan perbankan dan bukan perbankan. Pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang peranannya sangat penting adalah pembiayaan bukan perbankan, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman dalam negeri. SBN/SBSN dijual secara luas kepada lembaga keuangan maupun masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan portofolio SBN/SBSN terus dilakukan pengembangan instrumen baru, perkuatan infrastruktur dan koordinasi pengelolaannya.

Sedangkan pinjaman dalam negeri diperoleh melalui pembiayaan perbankan BUMN, perbankan swasta dalam negeri dan Pemerintah Daerah. Pinjaman dalam negeri Pemerintah dijaga supaya tidak mengganggu penyerapan kredit sektor swasta dan dilakukan terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman komersial luar negeri. Dalam upaya tersebut, kebijakan pemerintah diprioritaskan untuk penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan dan penguatan kapasitas lembaga yang terkait dengan pengadaan pinjaman dalam negeri. Hal ini diarahkan untuk memperkuat mekanisme koordinasi kelembagaan dalam pemanfaatan pinjaman, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan sumber dana investasi yang berasal dari tabungan masyarakat. Skema pendanaan dari perbankan dapat bersifat konvensional maupun syariah. Di samping perbankan, dana masyarakat dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank antara lain terdiri dari lembaga pembiayaan termasuk lembaga pembiayaan infrastruktur dan lembaga pembiayaan ekspor, lembaga asuransi, lembaga dana pensiun, lembaga pegadaian, lembaga pasar modal dan sebagainya. Potensi lembaga-lembaga keuangan ini perlu lebih diarahkan pada pembiayaan di sektor riil untuk mendorong investasi. Untuk itu terus dilakukan upaya penyempurnaan peraturan dan kebijakan untuk mendukung peran perbankan, non-perbankan, dan pasar modal

sebagai sumber pendanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan nasional, PMDN/PMA juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan nasional. Untuk meningkatkan PMDN/PMA, strategi utamanya adalah penyempurnaan kebijakan untuk mencapai iklim investasi yang lebih kondusif serta penyediaan infrastuktur yang andal dan memadai.

Potensi untuk meningkatkan sumber pendanaan pembangunan nasional juga dapat dilakukan dengan mendorong dan mengembangkan skema pendanaan pembangunan yang melibatkan peran dan kontribusi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan antara lain: (i) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)/Public Private Partnership (PPP), (ii) Corporate Social Responsibility (CSR), dan (iii) Donasi/Zakat.

Kemampuan pihak swasta dalam menurunkan biaya, memperpendek waktu penyediaan, serta mengelola manajemen konstruksi dan fasilitas secara lebih efisien menyebabkan KPS dapat menawarkan nilai uang (*value for money*) dibandingkan dengan pembangunan fasilitas yang sama yang dikelola oleh pemerintah. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan skema pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), dilakukan dua hal utama yaitu optimalisasi skema KPS dan peningkatan kualitas pemanfaatan skema KPS.

Upaya optimalisasi skema KPS dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Pengembangan, penyempurnaan dan harmonisasi berbagai kebijakan dan peraturan sektoral maupun regional, untuk memfasilitasi dan memperlancar pembentukan KPS terutama penyempurnaan Peraturan Presiden 67/2005 dan peraturan penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana publik.
2. Pengembangan peraturan perundang-undangan untuk memperluas bidang prioritas KPS selain di bidang infrastruktur.

Upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan skema KPS dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Penyusunan buku kerjasama pemerintah dan swasta (*PPP book*) yang berisi tentang daftar proyek pemerintah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta setiap awal tahun, sesuai dengan siklus rencana kerja pemerintah. Sesuai dengan amanat Inpres 5/2008, *PPP Book* disusun dan diterbitkan sebagai upaya menciptakan mekanisme penyiapan proyek yang lebih terintegrasi dengan siklus anggaran pemerintah, transparan dan akuntabel. Dalam upaya optimalisasi partisipasi swasta dalam pembangunan, rencana penyiapan proyek pemerintah yang dikerjasamakan dengan swasta harus terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah agar kemudian dapat diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.



2. Penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan.

Pelaksanaan CSR oleh badan usaha yang beroperasi di Indonesia telah diamanatkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR selanjutnya lebih diarahkan kepada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, antara lain termasuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) serta penanganan perubahan iklim. Mengingat potensi CSR cukup besar dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan, maka harus dilakukan upaya harmonisasi kebijakan lembaga/perusahaan dengan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Skema pendanaan pembangunan lain yang semakin berkembang adalah yang terkait dengan keagamaan, seperti zakat. Beberapa badan pengelola zakat sudah mulai mengembangkan sistem pengelolaan zakat secara lebih profesional dan juga berpotensi untuk mendukung program pemerintah. Untuk itu, sumber dana ini terus didorong agar semakin meningkat, antara lain melalui penguatan lembaga dan manajemen pengelolaan dana berbasis keagamaan serta pemanfaatannya selaras dengan pembangunan nasional.

Selain sumber dan skema pendanaan di atas, terdapat skema global yang berpotensi sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional, seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund, dan lain sebagainya. Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, dilakukan pengembangan dan penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang dapat mendukung pemanfaatan dana-dana tersebut.

TABEL 3
KERANGKA EKONOMI MAKRO
2010-2014

	Proyeksi Jangka Menengah				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi	5,5 - 5,6	6,0 - 6,3	6,4 - 6,9	6,7 - 7,4	7,0 - 7,7
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)					
Konsumsi					
Masyarakat	5,2 - 5,3	5,2 - 5,3	5,3 - 5,4	5,3 - 5,4	5,3 - 5,4
Pemerintah	10,8 - 10,9	10,9 - 11,2	12,9 - 13,2	10,2 - 13,5	8,1 - 9,8
Investasi	7,2 - 7,3	7,9 - 10,9	8,4 - 11,5	10,2 - 12,0	11,7 - 12,1
Ekspor	6,4 - 6,5	9,7 - 10,9	11,4 - 12,0	12,3 - 13,4	13,5 - 15,6
Impor	9,2 - 9,3	12,7 - 15,2	14,3 - 15,9	15,0 - 16,5	16,0 - 17,4
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)					
Pertanian	3,3 - 3,4	3,4 - 3,5	3,5 - 3,7	3,6 - 3,8	3,7 - 3,9
Industri Pengolahan	4,2 - 4,3	5,0 - 5,4	5,7 - 6,5	6,2 - 6,8	6,5 - 7,3
Nonmigas	4,8 - 4,9	5,6 - 6,1	6,3 - 7,0	6,8 - 7,5	7,1 - 7,8
Lainnya	6,5 - 6,7	7,0 - 7,3	7,3 - 7,7	7,5 - 8,4	7,8 - 8,6
PDB per Kapita					
(US\$)	2.555	2.883	3.170	3.445	3.811
Riil Harga Konstan 2000 (Ribu Rp)	9.785	10.255	10.790	11.389	12.058
Stabilitas Ekonomi					
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	3,5 - 5,5	3,5 - 5,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	9.750 - 10.250	9.250 - 9.750	9.250 - 9.750	9.250 - 9.850	9.250 - 9.850
Suku Bunga SBI 3 bln (%)	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5	5,5 - 6,5	5,5 - 6,5
Neraca Pembayaran					
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	7,0 - 8,0	11,0 - 12,0	12,5 - 13,5	13,5 - 14,5	14,5 - 16,5
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	8,0 - 9,0	14,0 - 15,6	16,0 - 17,5	17,0 - 18,3	18,0 - 19,0
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	74,7 - 75,6	82,4 - 84,1	89,6 - 92,0	96,1 - 99,2	101,4 - 105,5
Keuangan Negara *)					
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,6	-1,9	-1,6	-1,4	-1,2
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,4	12,6	13,0	13,6	14,2
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	29	28	27	25	24
Pengangguran dan Kemiskinan					
Tingkat Pengangguran (%)	7,6	7,3 - 7,4	6,7 - 7,0	6,0 - 6,6	5,0 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	12,0 - 13,5	11,5 - 12,5	10,5 - 11,5	9,5 - 10,5	8,0 - 10,0

*) Angka tahun 2010 adalah angka APBN 2010 yang akan disesuaikan pada saat APBN-P 2010

ditetapkan

5.2.5 Pendanaan melalui Transfer ke Daerah

Pendanaan pembangunan melalui transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi atau penyerahan kewenangan atas sebagian urusan pemerintahan ke daerah yang dimulai sejak tahun 2001, alokasi transfer ke daerah terus meningkat. Pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah baru mencakup Dana Perimbangan, tetapi sejak tahun 2002, juga mencakup Dana Otsus dan Dana Penyesuaian.

Dalam periode 2010-2014 akan dilakukan restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah serta memperjelas kedudukan Dana Perimbangan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih selaras dengan perimbangan kewenangan Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu, pengalokasian transfer ke daerah dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
2. menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
4. meningkatkan daya saing daerah;
5. mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro;
6. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
7. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
8. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Pengelolaan transfer ke daerah senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, efisien, adil, transparan, akuntabel, serta memiliki kinerja terukur.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil (*by origin*). DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Sumber-sumber penerimaan yang dibagihhasilkan yaitu penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil tembakau) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Penggunaan DBH tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah penerima kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Arah kebijakan pengalokasian DBH dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel;
3. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerah penghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
4. Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan hidup pascakegiatan eksplorasi.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU merupakan transfer pemerintah Pusat kepada Daerah dan bersifat *Block Grant* yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. DAU terdiri dari DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005. Alokasi DAU untuk daerah otonom baru (DOB) dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas DAU sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif serta pelayanan publik yang lebih merata di daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

1. meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap;
2. menyempurnakan formula alokasi DAU antara lain dengan meniadakan penggunaan variabel belanja pegawai, menambahkan variabel untuk memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan/atau kompensasi kepada daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung;
3. menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU berdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai dengan Analisis Standar Belanja (ASB);

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sebagai salah satu instrumen Dana Perimbangan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi besaran alokasi, cakupan bidang DAK, maupun jumlah daerah yang memperoleh alokasi DAK. Beberapa kendala dan permasalahan dalam pengelolaan DAK selama ini meliputi : 1) masih adanya kekurangtepatan pemahaman tentang konsep DAK baik di pusat maupun di daerah; 2) masih relatif kecilnya pagu nasional DAK dibandingkan dengan kebutuhan; 3) batasan penggunaan DAK sesuai peraturan perundangan yang ada masih menekankan pada kegiatan fisik, sehingga kurang dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap perencanaan kegiatan secara utuh; 4) masih terbatasnya kapasitas perencanaan DAK yang berbasis kinerja, serta selaras dan terpadu dengan perencanaan sektoral nasional; 5) masih rendahnya akurasi data teknis yang diperlukan untuk perencanaan dan alokasi DAK; 6) formula alokasi DAK yang ada belum sepenuhnya dapat menjamin kesesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah; 7) masih kurang terintegrasinya DAK ke dalam siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah; 8) belum tersedianya pedoman yang jelas tentang koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 9) masih kurangnya sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBD; 10) masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam pemantauan dan evaluasi DAK serta rendahnya kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK ke pusat; dan 11) masih relatif lemahnya pengawasan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan DAK.

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnya efektivitas DAK sebagai instrumen pendanaan dalam rangka mendorong pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan desain konsep DAK dalam rangka memperjelas kedudukan, peran dan misi DAK sebagai salah satu instrumen pendanaan desentralisasi yang efektif untuk membantu mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan dasar publik dan memberikan insentif kepada daerah tertentu untuk meningkatkan upaya pencapaian sasaran prioritas nasional;
2. Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK agar lebih optimal untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Selain itu akan dilakukan transformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah, seperti antara lain: dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana pengembangan infrastruktur perdesaan, ke DAK;

3. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), termasuk program yang bersifat lintas (*cross cutting*) sektor dan program yang bersifat kewilayahan yang menjadi prioritas nasional;
4. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja, dan penyediaan data teknis yang akurat;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.;

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria alokasi yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, kriteria tersebut terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria tersebut disempurnakan sejalan dengan revisi UU No. 33 Tahun 2004.

Bidang DAK ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan DAK untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Sehubungan dengan itu, dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang layak dipertimbangkan untuk didanai DAK meliputi antara lain: pelayanan dasar publik yang bersifat wajib seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar, keluarga berencana, ketahanan pangan; infrastruktur dasar; logistik nasional; lingkungan hidup; dan kewilayahan (daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik).

Dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang didanai DAK adalah:

1. Khusus tahun 2010, bidang DAK telah ditetapkan meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Infrastruktur Jalan, d) Infrastruktur Irigasi, e) Infrastruktur Air Minum, f) Infrastruktur Sanitasi, g) Prasarana Pemerintahan Daerah, h) Kelautan dan Perikanan, i) Pertanian, j) Lingkungan Hidup, k) Keluarga Berencana, l) Kehutanan, m) Sarana dan Prasarana Perdesaan, dan n) Sarana Perdagangan.
2. Pada tahun-tahun selanjutnya bidang kegiatan yang didanai DAK akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, Dana Otsus dialokasikan baik untuk Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat beserta seluruh kabupaten/kota yang berada di daratan Papua, dengan ketentuan: (i) dana otonomi khusus yang besarnya 2 persen dari total DAU Nasional akan dibagi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) tambahan dana otonomi khusus untuk infrastruktur akan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara terpisah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika dalam perkembangannya terdapat daerah pemekaran baru maka kebijakan dan alokasinya akan dikoordinasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otsus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus, kebijakan yang ditempuh hingga saat ini antara lain dengan mensyaratkan adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri pada setiap tahap penyaluran, agar pemanfaatan Dana Otsus direncanakan dengan baik dan menghasilkan output bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pengalokasian Dana Otsus berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 terus dilanjutkan, dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana Otsus selama ini;
2. Melakukan transformasi secara bertahap Dana Otsus ke Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan;
4. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan dalam rangka otonomi khusus yang diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus NAD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dana perimbangan dan dana otonomi



khusus tersebut diperlukan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan terutama terkait Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program aksi pembangunan nasional dari pasangan Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. RPJMN ini terdiri atas 3 (tiga) buku: yang pertama memuat prioritas pembangunan nasional, kedua memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan, dan ketiga memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman bagi pimpinan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN harus didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif (5) sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam dokumen ini tetap dilanjutkan di dalam rangka mencapai visi di atas.

Ke depan, melalui kerja keras, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen bangsa, Bangsa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang besar, maju, dan bermartabat. Bangsa yang menjadi kekuatan terpenting di Asia dan sejajar dengan bangsa dan negara-negara maju di dunia.



LAMPIRAN

MATRIKS PENJABARAN PRIORITAS NASIONAL